

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

Mutiara Desa Indonesia Timur

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Journal volume
Authors	IRE
Publisher	IRE
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-04-18 01:16:12
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/188571

Sorot

6

Pada kenyataannya, desa mampu menyediakan pelayanan publik bagi warga. Ini misalnya dapat dilihat seberapa jauh Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk mendukung berjalannya pelayanan publik bagi warga. Pelayanan publik yang baik di tingkat desa secara berkesinambungan dapat menjadi pijakan bagi arah pembangunan desa.

Wawancara

Perkembangan terkini, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa banyak yang ditata ulang guna memberi ruang lebih besar kepada warga untuk ikut serta secara lebih aktif membangun desa. Akan tetapi rumusan tersebut acap berakhir dengan menafikan perencanaan strategis warga. Musrenbangdes misalnya, ketika dibawa ke ranah yang lebih tinggi dapat berubah drastis sesuai dengan kepentingan elit pemerintahan daerah atau kabupaten.

Gagas

18

Tantangan terbesar demokrasi yang dihadapi sebagian besar masyarakat Filipina sejak masa penjajahan Spanyol hingga kini adalah dominasi politik keluarga yang menguasai daerah, provinsi, dan bahkan pada level nasional. Klan politik inilah yang menentukan kebijakan dan masa depan Filipina melalui akses dan jaringan kekerabatan yang dimiliki sebagai modal utama, meskipun secara prosedural, demokrasi sudah diterapkan melalui pemilihan langsung yang memungkinkan siapapun bisa menjabat posisi penting untuk menentukan kebijakan.

16

Potensi

30

Desa Mbatakapidu yang berada dalam wilayah kecamatan Kota Waingapu memiliki luas 28,2 km. Secara administratif desa ini terbagi ke dalam 5 dusun, 12 RW dan 24 RT. Penduduk desa ini berjumlah 1.668 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 61 jiwa/km yang terdiri dari 357 rumah tangga (KK) dengan rata-rata 5 jiwa per rumah tangga. Sebagai desa yang masuk dalam katagori krisis pangan, hampir sebagian besar penduduknya hidup dalam garis kemiskinan.



Perspektif	3
Surat Pembaca	4
Sorot	6
Wawancara	16
Gagas	18
Manifesto	22
Kupas	26
Potensi	30
Pustaka	32
Sosok	34
Refleksi	36



Penanggungjawab Sukasmanto Pemimpin Umum Abdur Rozaki Pemimpin Redaksi M Zainal Anwar Redaktur Senior Sutoro Eko, Bambang Hidayana, Arie Sujito, Krisdyatmiko Redaktur Pelaksana Sugeng Yulianto Sidang Redaksi Abdur Rozaki, Arie Sujito, Dina Mariana, Bornie Kurniawan, Bambang Hidayana, Krisdyatmiko, Machmud NA, Sugeng Yulianto, Sunaji Zamroni, Titok Hariyanto Reporter Anik Susiyani, Melanie Jayanti, Fathor Rahman MD, Mohamad Fathollah

Kontributor Ashari CE (Dellaware USA), Nur Izzah Millati (Yogyakarta), Anton Kasaulya (Ambon-Maluku) Artistik & Fotografi Candracoret, Wiwid W Pemimpin Perusahaan Hesti Rinandari Sekretaris Rima Sirkulasi, Iklan, & Pemasaran Machmud NA Alamat Redaksi Jalan Palagan Tentara Pelajar Km 9,5 Dusun Tegalrejo, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta Telp/Faks +62 274 867-686 atau 748-2091 Email office@ireyogya.org Website www.ireyogya.org.

Redaksi menerima sumbangan tulisan (opini atau tulisan reportase), fotografi, ilustrasi yang selaras dengan visi dan misi pemberdayaan IRE.



Review Flamma Edisi 34

Flamma Edisi 34 April-Juni 2012

Menyajikan isu tentang *corporate social responsibility* (CSR). Laporan utama edisi 34 ini mengaggas perihal penggunaan dana CSR agar lebih berpihak pada orang miskin. Selain itu, sebagai upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah tambang khususnya, diperlukan sebuah strategi kemitraan antar pihak sehingga warga miskin bisa lebih baik hidupnya. Flamma edisi ini juga menegaskan bahwa CSR bukanlah sedekah atau sekedar alat pemadam kebakaran tetapi sebuah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial disekitarnya.

IRE Ngunduh Anak

D pada bulan Agustus ini, keluarga besar IRE sedang berbahagia. Bagaimana tidak. Tiga orang stafnya sekaligus mendapat karunia dan amanah dari Tuhan berupa anak. Uniknya, semua anak tersebut merupakan anak kedua. Diawali pada tanggal hari Kamis Pahing tepatnya tanggal 16 Agustus 2012, Arie Sujito mendapatkan anak keduanya yakni laki-laki yang bernama Saguna Marhaen Bajrayekti. Tidak lama kemudian, yakni pada hari Sabtu tepatnya tanggal 25 Agustus 2012, M. Zainal Anwar juga memperoleh anak keduanya berupa seorang perempuan yang diberi nama Anais Madania Gantari. Hanya selang 5 hari, tepatnya pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012, Triyanto juga memperoleh anak keduanya yang diberi nama Keenar Hanna Nailatul Izza.

Semoga, kehadiran buah hati tersebut tentu menjadi keceriaan dan pelita bagi keluarga serta menjadi generasi yang cerdas, sehat, membanggakan orang tua dan keluarga serta berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa. 📷



Kinarhana Nailatul Izha
putri dari Triyanto



Anais Madania Gantari
Putri dari Zainal



Saguna Marhaen Bajrayekti
Putra dari Arie Sujito

Foto: Dok. IRE

MELIPATGANDAKAN PRAKTIK BAIK

Sebagai sumber penghidupan di tingkatan yang paling basis, desa adalah masa depan bagi sebagian besar warga masyarakat Indonesia. Mendorong perbaikan untuk kehidupan desa yang sejahtera dan demokratis adalah salah satu cara merawat Indonesia. Dalam beberapa tahun perkembangan terakhir ini, kita memperoleh kabar gembira dan penuh optimis tentang masa depan desa, khususnya di Indonesia bagian timur yang selama ini menjadi mitra ACCESS. Desa yang sebelumnya bercorak komunal dan parokial secara perlahan didorong untuk menjadi desa sipil yang demokratis, emansipatif dan responsif dalam melayani warga.

Dalam menjalani riset kolaboratif dengan ACCESS, IRE menemukan tiga praktik baik yang kini mulai tumbuh di desa Indonesia bagian timur. Pertama, menguatnya akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah desa. Hal ini ditandai oleh adanya kepemimpinan kepala desa yang pro perubahan. Kedua, kebangkitan representasi organisasi masyarakat sipil (OMS). Yang paling menonjol adalah bangkitnya organisasi perempuan dalam membangun keterlibatan dan akses terhadap tata kelola desa. Ketiga, hadirnya tradisi baru dan terlembaganya persenyawaan (*engagement*) dan *mutual trust* antaraktor dan antar institusi dalam desa. Hal ini tercermin dalam mendorong perencanaan pembangunan desa. Misalnya penyusunan RPJMDes yang melampaui formalisme.

Kepemimpinan yang pro perubahan, bangkitnya organisasi masyarakat sipil dan hadirnya tradisi baru persenyawaan antar aktor, antar institusi dalam desa makin mendorong adanya karakter desa sipil (*civil village*) yang menjadikan desa benar-benar bermanfaat bagi warganya. Kehadiran berbagai institusi dari luar itu membawa nilai-nilai baru seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan

kesetaraan gender yang pelan-pelan mengalami internalisasi dalam pemerintahan, perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Karena itu, desa sipil ini tumbuh menjadi institusi publik yang mampu melampaui institusi adat, komunal dan parokhial, bahkan mampu menembus karakter korporatis. Berbagai institusi dari luar itu tetap menghargai kearifan lokal, tetapi mereka mulai memperkenalkan perencanaan partisipatif yang membawa pemimpin dan masyarakat desa untuk mengalihkan diskusi dari isu-isu komu-



nal dan parokhial ke dalam isu-isu publik seperti pelayanan, perencanaan dan keuangan.

Meskipun kekerabatan (*parokhial*) tetap bertahan di desa sipil tetapi pengaruh kekerabatan itu melemah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. BPD menjalankan fungsi *check and balances*

terhadap kepala desa tetapi semangat kemitraan BPD dengan pemerintah desa tetap dijaga dengan baik. PKK tidak lagi menjadi institusi korporatis tetapi telah tumbuh menjadi basis politik representasi bagi kaum perempuan desa, dimana tokoh-tokoh perempuan menggunakan PKK untuk membangun kesadaran *gender* kepada kaum perempuan, memperjuangkan hak dan kepentingan anak dan perempuan.

Di luar PKK, desa-desa wilayah kerja ACCESS juga menampilkan kehadiran CBOs berbasis perempuan seperti Gerakan Perempuan Peduli Desa dan Kolaborasi Perempuan Desa, *Community Center*, yang berperan menggerakkan emansipasi lokal, membangun kesadaran baru tentang isu-isu publik seperti kesehatan dan pendidikan, memperjuangkan hak anak dan perempuan. Di banyak desa, gerakan perempuan ini mampu membuahkan pembangunan sarana air bersih yang mengalir sampai ke rumah-rumah warga sehingga memudahkan kerja-kerja kaum perempuan dan juga berkontribusi terhadap perbaikan kesehatan. Kerja-kerja advokasi mereka juga membuahkan perbaikan *supply* layanan kepada ibu hamil dan balita melalui wadah posyandu.

Inovasi dan emansipasi desa yang direkayasa dan difasilitasi oleh ACCESS dan para mitra serta digerakkan oleh aksi kolektif - menghasilkan sejumlah perubahan penting yang di dalamnya mengandung pelajaran dan mutiara, yang tentu relevan dengan agenda kemandirian desa dan penanggulangan kemiskinan. Mutiara perubahan pada saat ini sangat relevan untuk membangkitkan optimisme baru tentang desa. Praktik yang baik semacam ini sangat penting untuk dilipat gandakan menjadi kekuatan perubahan di berbagai desa lainnya di Indonesia. 📌

Abdur Rozaki

Salam,

Saya mahasiswa Unika Parahyangan Bandung Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Apa IRE terbuka untuk magang?

Ilham di Bandung

Jawaban

Kami sangat terbuka untuk menerima mahasiswa magang. Silahkan untuk mengirimkan surat resmi ke bagian administrasi IRE. Untuk diketahui, bagian program IRE akan menyeleksi calon mahasiswa magang untuk menyesuaikan dengan program dan aktivitas yang sedang dilakukan IRE.

Redaksi

Salam, saya mahasiswa S1 Fisipol UGM, sedang menulis skripsi. saya ingin menggunakan beberapa penelitian yang pernah dilakukan IRE sebagai salah satu bahan analisis saya. Bagaimana saya bisa mendapatkannya? kalau langsung datang ke kantor, bagaimana prosedurnya? Terimakasih...

Nella di Yogyakarta

Jawaban

Mba Nella bisa langsung datang ke Perpustakaan IRE, disana Mba Nella bisa mendapatkan hasil-hasil penelitian IRE yang sudah dipublikasikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

Redaksi

Halo IRE... Salut atas websitenya, sangat membantu kami yg tinggal di daerah yang sangat terbatas dengan buku. Semoga suatu saat bisa berpatner. Terima Kasih

Diana di Berau Kalimantan Timur

Jawaban

Terima kasih mbak Diana. Kami sangat bahagia jika bisa bermanfaat bagi sesama. Salam Kenal !!!!!!!

Setelah Membuka website IRE secara pribadi saya mengucapkan salut dan mengapresiasi positif apa yang sudah dilakukan. Saya berharap dapat menjalin mitra kerja untuk pemberdayaan masyarakat terutama sektor buruh di lapangan pendidikan, politik maupun organisasi dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi cita cita IRE khususnya di Sumatera Selatan.

Lubis Henderi di Palembang, Sumatera Selatan

Jawaban

Salam kenal juga. Untuk mewujudkan cita-cita IRE, kami selalu terbuka untuk bisa berteman dan berjejaring dengan siapa saja dan dimana saja.



Surat Pembaca ini di asuh oleh tim Redaksi Majalah Flamma IRE Yogyakarta, silahkan memberikan saran, kritik positif, bertanya mengenai informasi tentang kegiatan IRE Yogyakarta, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan di IRE.

Pertanyaan atau informasi bisa disampaikan melalui web dan email kami di
Email office@ireyogya.org
Website www.ireyogya.org.





Institute For Research and Empowerment

PROFIL PERPUSTAKAAN

DESKRIPSI PERPUSTAKAAN

Perpustakaan IRE memiliki kekhususan koleksi dalam bidang kajian Desa, Pemberdayaan Masyarakat Adat, Militarisme, Otonomi Daerah, Otonomi Desa, dan Keuangan Daerah. Perpustakaan IRE juga membangun koleksi khusus seputar kajian penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan.

Pengunjung dapat meminjam koleksi Perpustakaan IRE dengan syarat meninggalkan kartu identitas yang masih berlaku.

Pengunjung dapat bertanya perihal koleksi dan menyampaikan permohonan penelusuran informasi ke Perpustakaan IRE, baik melalui telepon selular maupun surat elektronik.

JAM BUKA/LAYANAN

Senin - Jumat : 08.30 - 16.00 WIB
Sabtu, Minggu & Hari Libur : Tutup



IRE Yogyakarta

Dusun Tegalrejo, Desa Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.

Telp/fax: (0274) 867-686 atau 748-2091 Email: office@ireyogya.org

Website: www.ireyogya.org

Pengantar

Program "National Influencing: Manfaat Program ACCESS terhadap Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia" merupakan inisiatif kerjasama IRE dengan ACCESS (Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme)-AUSAID guna mendorong reformasi kebijakan nasional yang mendukung kemandirian desa dan penanggulangan kemiskinan. Program ini rencananya akan dilakukan dalam kurun 2011-2013. Secara khusus, Edisi kali ini akan mengupas berbagai inovasi desa di kawasan Indonesia Timur.

Desa Melayani Warga



Pada kenyataannya, desa mampu menyediakan pelayanan publik bagi warga. Ini misalnya dapat dilihat seberapa jauh Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk mendukung berjalannya pelayanan publik bagi warga. Pelayanan publik yang baik di tingkat desa secara berkesinambungan dapat menjadi pijakan bagi arah pembangunan desa.

wasan ini biasanya diselenggarakan pasca Musrenbang kecamatan.

Adanya urun rembuk warga dan pedes secara berkesinambungan dan partisipatif tidak hanya berdampak pada pembangunan desa secara positif, namun juga secara tidak langsung partisipasi lintas sektoral (kaum perempuan dan warga miskin) yang ada di Arungkeke tersebut mampu menembus struktur politik desa Arungkeke yang sebelumnya bersifat aristokratis-parokhial. "Kepala desa, perangkat desa, BPD, kader warga, kaum perempuan, dan warga miskin mempunyai kesempatan terbuka, duduk bersama, serta menjalin engagement yang baik. *Democratic engagement* ini menjadi arena lokal untuk membicarakan, membangun kesadaran publik, dan mengambil keputusan tentang isu-isu publik yang menyangkut kepentingan kaum perempuan dan kaum miskin. Karena itu tradisi dan kesadaran baru ini menjadi kekuatan pendorong transformasi dari "desa parokhial" menuju "desa sipil" atau desa sebagai institusi publik yang bermanfaat bagi warga," ungkap Zainal, peneliti IRE.

Tidak hanya itu, ADD dimanfaatkan sebaik mungkin dalam membangun desa. Alokasi ADD di desa Arungkeke dibagi berdasarkan Musrenbangdes yang dihadiri sekitar 35 orang (4 orang perempuan).

Banyak kisah sukses terkait pelayanan pemerintah desa (pmdes) kepada warganya. Di Indonesia Timur sebagian besar desa-desa yang menjadi mitra ACCESS melakukan pembaharuan terencana melalui perencanaan partisipatif antara warga, pmdes, dan unsur perangkat desa dan didukung pemerintah daerah.

Mengutip laporan riset Sri Roviana dan M. Zainal Anwar (IRE-ACCESS, 2012) di kabupaten Jeneponto-Prov. Sulawesi Selatan, di sana banyak terlihat pmdes menjadi pintu gerbang bagi kebangkitan perekonomian warga. Adanya pelayanan baik yang diberikan pmdes Arungkeke, misalnya, seakan memberikan nafas segar bagi warga untuk lebih produktif menghasilkan karya. Arungkeke menjadi prototype desa yang mampu menjadikan Musrenbang desa (musrenbangdes)

bermanfaat sehingga pada akhirnya memiliki RPJMDes yang dapat digunakan sebagai panduan membangun desa. Sementara ACCESS mendorong pelayanan pmdes lewat upaya peningkatan kapasitas warga miskin. Contoh di dusun Lasanglasang, petani didukung untuk membuat pengolahan makanan dari rumput laut, pembibitan rumput laut, dan pembuatan koperasi nelayan.

Di Arungkeke, Musrenbangdes dijadikan kebijakan desa dalam mencari jalan keluar dari persoalan-persoalan warga. Tidak hanya Musrenbangdes, pihak kecamatan Arungkeke saat ini mengembangkan Musrenbang kawasan yang berisi perencanaan terpadu antar desa dalam membangun sarana dan prasarana antar desa, seperti saluran air irigasi, jalan desa, jalan tani, dan lainnya. Musrenbang ka-

Hasilnya digunakan untuk membangun ruang kantor PKK, membangun TK, membayar guru ngaji, mendanai majelis taklim, dan membeli tanah untuk proyeksi pemanfaatan desa.

ADD secara eksplisit telah dijelaskan dalam PP no. 72/2005 tentang Desa kemudian disusul dengan SK Mendagri tertanggal 17 Agustus 2006 no. 140/1841/SJ yang ditujukan kepada seluruh pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. ADD ini berasal dari dana penyeimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sesuai pasal 68 ayat 1 huruf c disebutkan bahwa desa memperoleh jatah ADD untuk memperkuat proses pembangunan, pemerintahan, dan operasional pemerintahan desa secara berkelanjutan paling sedikit 10%. Tak pelak bahwa ADD disusun dan dialokasikan kepada pemerintah kesatuan desa sebagai bagian sumber kekuatan pembangunan dan demokrasi di tingkat desa.

Pengelolaan dan pemanfaatan ADD yang baik dirasakan juga oleh warga desa Julubori, kecamatan Pallanga, Kabupaten Gowa. Pengelolaan aset yang dimiliki desa dimanfaatkan dengan baik oleh segenap elemen masyarakat. ADD dialokasikan misalnya, pengadaan mobil P3K. Pengadaan kendaraan ini merupakan yang pertama dan satu-satunya yang ada di kabupaten Gowa yang dilakukan oleh kepala desa. "Adanya mobil P3K desa Julubori sangat membantu beban masyarakat di mana ketika membutuhkan kendaraan, maka dapat memanfaatkan mobil tersebut. Kami sangat bersyukur dengan adanya program kepala desa (pemerintah desa) dan kami merasa sangat terbantu dengan adanya mobil P3K. Karena ketika kami membutuhkan kendaraan untuk keperluan mendadak, maka dapat memanfaatkan mobil tersebut," ungkap Hembawati, warga Julubori.

Dalam pengelolaan ADD, pemerintahan desa di Kabupaten Bima cukup partisipatif. Hal tersebut terlihat misalnya, adanya kemauan politik desa untuk membuat RPJMDes secara partisipatif, adanya kemauan warga untuk meningkatkan partisipasi dan kepedulian dalam memelihara hasil-hasil pembangunan, serta pengelolaan keuangan pembangunan desa yang transparan. Selain hal tersebut, inovasi kebijakan publik yang patut ditiru oleh pemerintahan desa lainnya adalah pemberlakuan kebijakan (perdes) upah minimum layak diterima buruh tani. Menurut Dina Mariana, peneliti IRE, perdes di Bumi Pajo mengatur upah Rp. 30.000,- per hari baik untuk tenaga kerja laki-laki maupun perempuan. Ketetapan besaran upah minimum didasarkan pada pertimbangan kondisi ekonomi di masyarakat dan dirumuskan secara demokratis.

Inovasi lain datang dari desa Latompe di Kabupaten Muna. Adanya desa yang masuk konversi kawasan lindung nampak semua elemen masyarakat desa, mulai dari Kades, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, generasi muda bersepakat untuk menjaga dan merawat kawasan lindung. Menurut Sunaji Zamroni, peneliti IRE, meskipun 'kebijakan' merawat kawasan lindung tidak masuk legal formal (perdes), namun otoritas pemerintahan desa sudah dijalankan secara nyata dalam mekanisme melindungi kawasan kamutugha (kawasan hutan larangan).

Participatory Action

Inovasi tata kelola desa dapat dimulai dari mana saja. Untuk melayani warga dengan baik diperlukan suatu kebijakan yang baik pula. Kebijakan publik yang baik secara tidak langsung akan melahirkan suatu ketahanan sosial yang seimbang sehingga hidup warga merasa terayomi dan hak-haknya sebagai warga terpenuhi.

Adanya inovasi kebijakan publik yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat desa tentunya tidak lepas dari kemampuan pemerintahan desa dan masyarakatnya secara bersama-sama membangun kemandirian desa. Bagi IRE, kemandirian desa bukan berarti kesendirian dalam mengelola sumber daya publiknya yang menegasikan peran negara, tetapi kemandirian dalam arti memiliki kedaulatan, keleluasaan dan kepastian memiliki dukungan penganggaran untuk mengelola sumber daya publiknya (Sutoro Eko, 2006 : 275).

Kebijakan publik dalam tataran pemerintahan pusat dapat berbentuk UU, PP, Keppres, Peraturan Menteri, Perda, dan lainnya. Misalnya dalam melakukan pelayanan publik yang baik dan searah pemerintah mengeluarkan PP RI nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Mengacu pada PP tersebut pemerintah daerah dapat membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Strategis SKPD). Dari SPM dapat terlihat sejauh mana pelayanan publik dibuat bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Adanya regulasi perencanaan tingkat daerah tentunya dapat menjadi jalan bagi terciptanya pembangunan berkelanjutan. Seperti halnya perencanaan dan pelayanan publik yang telah tercermin pada desa-desa di Indonesia Timur di atas. Pengelolaan desa yang dipasrahkan kepada pemdes dan masyarakat secara partisipatif dapat memberikan wawasan luas bagi warga. Tidak hanya itu warga juga ikut

bertanggung jawab dalam pengelolaan aset menuju pembangunan berkelanjutan. Sedangkan partisipasi warga dapat menjadi ujung tombak pengawasaan kerja pemerintah daerah dan pemerintah desa prihal kebijakan yang diambil pro rakyat miskin atau malah sebaliknya pro terhadap pemegang kapital besar.

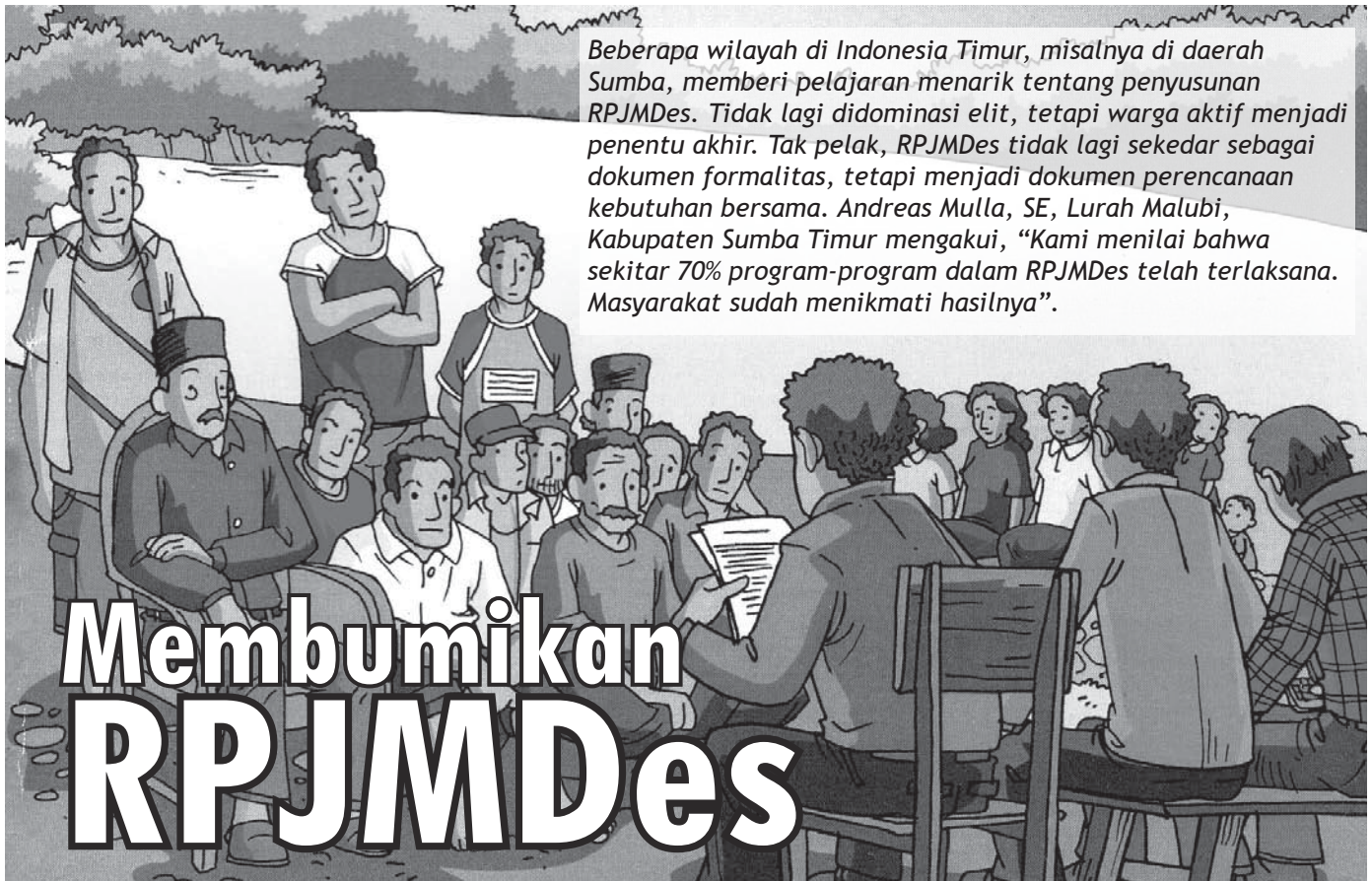
Untuk itu beberapa regulasi telah dicanangkan baik melalui PP atau Surat Edaran Bersama Menteri demi terwujudnya atmosfer kebijakan publik pro rakyat miskin. Namun demikian hingga saat ini belum nampak kemajuan signifikan dalam pembangunan kesadaran publik yang koheran dalam kesadaran politik warga.

Kalau dikalkulasi seluruh desa yang ada di Indonesia, Pemdes dan pemerintah daerah yang menjalankan kebijakan melalui pelibatan warga tidak banyak. Adanya Musrenbangdes sebagai bagian kebijakan partisipasi warga dalam penyusunan langkah strategis pembangunan desa seakan menjadi formalitas belaka.

Dalam menjalankan Musrenbang dari level dusun, desa sampai dengan Musrenbang di tingkat kabupaten, partisipasi warga dimaknai dalam bentuk formal prosedural. Partisipasi formal prosedural yang dipraktikkan meyakini bahwa kalau Musrenbang digelar dengan menghadirkan seluruh stakeholders maka bobot dokumen perencanaan yang dihasilkan bisa dikatakan partisipatif. Padahal sering sekali hasil-hasil Musrenbang desa ketika dibawa ke Musrenbang kecamatan menjadi hilang tidak dibahas, karena yang muncul dalam pembahasan Musrenbang kecamatan adalah pikiran camat, para delegasi desa, SKPD kecamatan dan juga anggota DPRD dari Dapil setempat yang menjadi tamu kehormatan (Sutoro Eko [ed], 2006; 266).

Berkaca pada hasil di atas secara kasat mata dapat dimaknai bahwa keberlangsungan pembangunan tidak hanya membutuhkan regulasi baik, tapi juga keterlibatan warga sebagai modal subject and object policies dalam menentukan arah pembangunan desa. Menurut Sutoro Eko, peneliti IRE dan dosen STPMD "APMD", keterlibatan warga dalam menentukan kebijakan publik dapat mengetatkan Musrenbangdes sebagai tolak ukur perencanaan pembangunan desa.

Semua elemen perlu mendorong proses pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada participatory action dan berdasarkan pada kebutuhan daerah atau desa setempat. Dengan begitu arah pembangunan dapat berjalan searah dan berkesinambungan. ■



Selama ini, mendengar tentang wilayah Indonesia timur selalu saja mendapat sajian yang tak sedap. Mulai dari rendahnya kualitas infrastruktur hingga buruknya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Tapi perlu diingat, kenyataan yang terjadi hari ini tak selalu sama dengan apa yang kita dengar kemarin. Indonesia timur, yang selama ini dibicarakan sebagai wilayah terbelakang, hari ini mulai menampakkan kenyataan berbeda. Dari hasil penelusuran Flamma, kenyataan tentang desa-desa demokratis di Indonesia timur mulai bermunculan, bak jamur dimusim penghujan.

Suatu kenyataan yang cukup mengejutkan, ketika daerah yang kerap mendapat julukan terbelakang, ditemukan banyak desa yang demokratis dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Di wilayah Kabupaten Sumba Timur misalnya, ada 11 desa dan 2 kelurahan yang pemerintahan desa atau kelurahannya mulai respek melibatkan warganya dalam penyusunan RPJMDes. Yakni, Matawai Maringu, Matawai Katingga, Kotak Kawau, Laimbonga, Praihambuli, Kelurahan Kawangu, Kamanggih, Mauramba,

Meurumba, Kelurahan Malumbi, Kamabata Bundung, Ndayayami, dan Kataka.

Pelaksanaan perencanaan pembangunan berbasis partisipatif mulai mengeliat. Masyarakat di sana mulai menyadari pentingnya terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan. Regulasi Mursrenbangdes untuk merumuskan dokumen RPJMDes nampak tak lagi elitis dan formalistik. Melainkan digelar dengan semangat demokratis. Kehadiran masyarakat tidak hanya sebagai pendengar setia. Tapi masyarakat diharuskan untuk ikut bersuara, karena suara masyarakat adalah pijakan dalam perumusan perencanaan pembangunan. Guna terciptanya pembangunan yang tepat sasaran akan kebutuhan riil masyarakat.

Dari laporan studi RPJMDes Kabupaten Sumba Timur, "Suara Warga Suara Pembangunan" (2010) terungkap, bahwa arah pembangunan di perdesaan atau kelurahan di sana lebih terkelolah, tepat sasaran terkontrol dengan baik. Hal itu tidak terlepas dari keberhasilan warga terlibat aktif dalam proses penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Sehingga pembangunannya benar-benar mempunyai arah yang jelas dan terukur dengan ad-

anya target-target per tahunnya. RPJMDes membantu pemerintah desa untuk mengelola berbagai sumberdaya yang ada, termasuk mensinergikan dengan program-program dari PNPM, LSM dan pihak-pihak lainnya.

Bagaimana kenyataan tersebut bisa terjadi? Dari hasil penelusuran Flamma terungkap, ada proses panjang yang melibatkan banyak pihak kenyataan itu bisa terjadi. Menurut Ferdinand Rondong, selaku koordinator program ACCESS Provinsi Sumba, kehadiran lembaga donor Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) dengan mitra kerjanya NGO lokal sangat berperan vital. Hal senada juga disampaikan Abdur Rozaki, peneliti IRE Yogyakarta, bahwa ACCESS dan mitra kerjanya telah menjadi katalisator kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat di sana. Perannya memang cukup menentukan, pedekatannya yang inovatif perlu mendapat apresiasi.

Bermula sejak tahun 2006, Pemerintah daerah Sumba Timur mencoba menjalin kerjasama dengan ACCESS Fase I serta bermitra NGO Mitra Samya dan Yayasan Kuda Putih Sejahtera (YKPS). Kerjasama

tersebut secara khusus mendampingi aparat desa, kelompok masyarakat dan kaum perempuan dalam menyusun RPJMDes dan RKPDes. Cara kerja yang mereka kembangkan adalah metode pendekatan *Community Led Assessment and Planning Process – Gender and Poverty Inclusive* (CLAPP-GPI). Menurut Ferdinand Rondong, ada tujuh tahapan dalam pendekatan tersebut, 1) Persiapan sosial dan desain kajian, 2) Identifikasi kondisi umum desa, 3) Analisis kemiskinan/kesejahteraan, 4) Refleksi mendalam, 5) Penyusunan RPJM-Desa (5 tahun), 6) Penyusunan RKP-Desa (1 tahun), 7) Pleno membangun komitmen.

Teknisnya, terlebih dahulu disiapkan para fasilitator CLAPP-GPI (melalui pelatihan, asistensi, dan lain-lain), yang semuanya adalah komunitas desa dan disebut Fasilitator Desa (Fasdes). Ada 5 orang Fasdes pada setiap desa yang terdiri dari unsur pemerintahan desa, unsur masyarakat yang dipilih langsung oleh komunitas, dan unsur organisasi perempuan yang ada di desa atau kelurahan. Mereka juga didukung oleh fasilitator dari LSM setempat dan 1 orang fasilitator wakil instansi perencanaan dari kabupaten. Dengan pendekatan ini, maka setiap desa dan kelurahan memiliki orang-orangnya sendiri (*village champion*) yang mampu memfasilitasi perencanaan pembangunan.

Pendekatan ini telah menghasilkan banyak fasilitator desa – orang-orang biasa di desa – yang dilatih dan memiliki kapasitas, antusiasme dan rasa percaya diri yang mumpuni untuk memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa. Pendekatan yang secara khusus didesain untuk menyusun RPJMDes dan RKPDes itu diintegrasikan dalam skema mekanisme Musrenbang (lihat gambar).

Pendampingan dengan pendekatan CLAPP-GPI itu dilakukan waktu pra-Musrenbangdes. Dimana fokusnya adalah pembangunan kualitas SDM. Hal itu dimaksudkan untuk mempersiapkan kemampuan warga untuk terlibat aktif dalam proses penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Pendekatan CLAPP-GPI juga disandarkan pada pertimbangan waktu Musrenbang yang umumnya hanya digelar sehari. Waktu sehari jelas tidak cukup untuk merumuskan sebuah perencanaan yang benar-benar partisipatif.

Untuk Sumba Timur, eksperimen awal hanya terbatas dilaksanakan pada 2 desa, tapi kemudian pada tahun 2007 diperluas cakupannya ke 9 desa dan 2 kelurahan. Dan terbukti hasilnya sangat baik, di forum Musrenbangdes warga tidak lagi sekedar menjadi pendengar setia sambutan para elit desa, melainkan

kan juga aktif bersuara. Bagi mereka dokumen RPJMDes dan RKPDes dijadikan buku pintar untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, buku pintar tersebut dijadikan rujukan penting untuk membangun desanya dengan alokasi dana swadaya. Menurut sosiolog alumnus UGM, Abdur Rozaki mengemukakan, keterlibatan warga dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes menumbuhkan modal sosial di tengah-tengah masyarakat dalam mendorong pembangunan desa.

Kenyataan suksesnya pemerintah daerah dalam mengawal penyusunan RPJMDes dan RKPDes secara partisipatif tidak hanya terjadi di Sumba Timur. Kenyataan serupa juga terjadi di Kabupaten Sumba Barat. Awalnya, Kabupaten Sumba Barat merupakan daerah yang memiliki rapor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) cukup rendah. Kenyataan rendahnya IPM masyarakat Sumba Barat menjadi beban tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mendorong warganya bisa menyusun RPJMDes dan RKPDes. Kemudian, pemerintah daerah Sumba Barat mengambil inisiatif, menjalin kerjasama dengan ACCESS phase II serta Ngo lokal sebagai mitra kerjanya.

Dinamika yang terjadi di Sumba Barat tidak jauh berbeda dengan apa terjadi di Sumba Timur. Di Sumba Barat, ada 21 desa yang mendapat pendampingan langsung dalam penyusunan RPJMDes, seperti halnya program ACCESS Fase I di Sumba Timur. Di Sumba Barat, dalam pelaksanaannya, yayasan Bahtera sebagai mitra ACCESS bersama dengan Kader Pembaharu Desa (Kapedes) terlibat langsung mengawal proses penyusunan dokumen RPJMDes dan RKPDes. Orang-orang Kapedes adalah masyarakat biasa yang tinggal di desa-desa di Sumba Barat.

Mereka adalah warga setempat, istilah lain dari Fasdes di Sumba Timur.

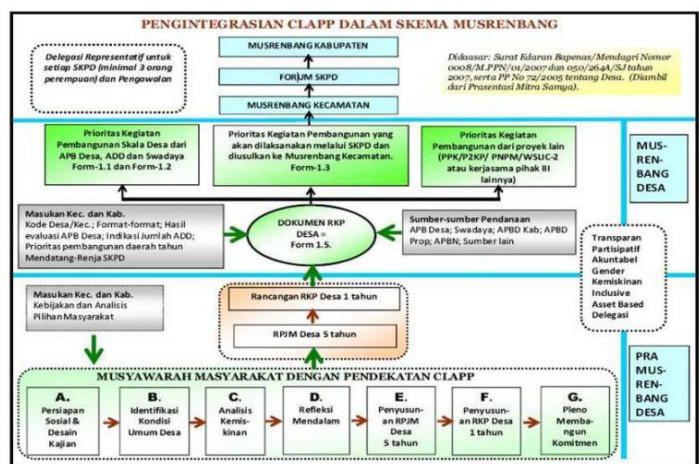
Sedangkan cara kerja yang ACCESS dan mitra kerjanya di Sumba Barat tidak jauh berbeda dengan yang dijalankan di Sumba Timur. Mereka menggunakan metode (Analisis Kemiskinan Partisipatif) dalam pendekatan *community lead action and participatory*

progres (CLAPP), *asset based approach* (ABA), dan *gender equity and social inclusion* (GSI). Metode AKP bertujuan untuk menemukan indikator kemiskinan di tingkat lokal dan analisis penyebab kemiskinan menurut suara warga sendiri. Kemudian hasilnya dimasukkan dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes. Dari sana terlihat dengan jelas kategori-kategori masyarakat miskin. Melalui dokumen tersebut, pemerintah desa menjadi lebih mudah untuk melakukan distribusi bantuan. Dokumen yang memuat AKP bisa mengontrol terjadinya kesalahan distribusi bantuan.

Salah seorang warga Desa Patiala Bawa sempat menuturkan, "Proses AKP yang dilakukan oleh Yayasan Bahtera bersama warga desa membuat warga saling mengetahui kondisi sebenarnya yang dialami oleh masing-masing warga di desanya, lalu mengetahui tingkat kemiskinan atau kesejahteraan warga sebenarnya sehingga dari hasil AKP itu warga yang paling miskinlah yang paling layak memperoleh bantuan". Program yang dijalankan ACCESS beserta mitra kerjanya yang didukung pemerintah daerah untuk mendorong penyusunan RPJMDes dan RKPDes secara partisipatif merupakan pendekatan inovatif yang penting dijalankan di daerah-daerah lain di Indonesia, ungkap Abdur Rozaki.

Dilain tempat, masih di Indonesia timur, di daerah Kabupaten Buton Utara, geliat masyarakatnya untuk terlibat dalam merumuskan RPJMDes dan RKPDes tak lagi disangsikan. Kesadaran masyarakat untuk mendukung kemajuan desanya masing-masing dengan pola terukur dan terencana semakin meningkat. Buton Utara merupakan kabupaten baru, pemekaran dari Kabupaten Muna. Meski usianya cukup muda, tapi semangat ma-

Pengintegrasian CLAPP-GPI dalam Skema Musrenbang



Sumber: Laporan Studi RPJMDes Kabupaten Sumba Timur, "Suara Warga Suara Pembangunan"

syarakatnya untuk maju sudah cukup "dewasa". Setidaknya, kesedia masyarakat untuk terlibat aktif dalam merumuskan perencanaan pembangunan desanya adalah cerminan awal kemajuan suatu daerah, seperti yang terjadi di Sumba Timur dan Sumba Barat.

Tidak jauh berbeda dengan daerah Sumba Timur dan Sumba Barat, kebangkitan masyarakat untuk terlibat dalam perumusan RPJMDes dan RKPDes merupakan hasil dari keterbukaan pemerintah daerah menerima program ACCESS dengan sejumlah mitra kerjanya Ngo lokal. Di Buton Utara ada dua Ngo lokal mitra ACCESS yang konsen melakukan penyadaran akan pentingnya warga terlibat dalam proses pembentukan RPJMDes dan RKPDes. Yakni, Yayasan Kreasi Insani Indonesia (YAKIIN) serta Lembaga Pemberdayaan Potensi Masyarakat Indonesia (LEPPMI). Kedua Ngo tersebut tidak bosan-bosannya mengugah kesadaran dan kemampuan masyarakat dengan berbagai pendekatan.

YAKIIN misalnya, sejak 25 Mei 2010 gencar melakukan upaya pembentukan Fasdes, Kelompok Pmdes, Lingkar Belajar Fasdes, pengembangan kapasitas dari mitra strategis, serta diskusi refleksi diantara tim pelaksana kerja YAKIIN. Kemudian terus berlanjut diadakan pelatihan CLAPP-GSI terhadap para Fasdes dan persiapan penjajakan kondisi desa. Sehingga masyarakat di sana memiliki kemampuan untuk terlibat dalam perumusan RPJMDes dan RKPDes. Lalu bangkit mengawal RPJMDes dan RKPDes dalam forum Musrembang Kecamatan, bahkan hingga ke Kabupaten. Secara formal, itulah kemajuan masyarakat Buton Utara, semakin partisipatif dan demokratis membangun perencanaan desa mereka masing-masing.

Lebih jauh, di level masyarakat, saat ini di sana masyarakat juga bergerak membuat inovasi-inovasi untuk lepas dari jerat kemiskinan. Di Desa Wa Ode Angkalo misalnya, warganya aktif membangun dan menggerakkan organisasi-organisasi sektoral seperti pertanian untuk kemajuan desanya. Dengan bahu-membahu masyarakat bergerak dan aktif memikirkan kondisi pertanian. Mulai dari mencari bibit, memasarkan hingga membangun branding hasil taninya. Apa yang mereka kerjakan lebih merupakan pengejawantah dari apa yang tertuang dalam RPJMDes atau RKPDes. Di Buton Utara, kesadaran berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan desanya tidak sekedar berhenti ditahap perencanaan, melainkan membangkitkan kesadaran-nya untuk bergerak secara swadaya

untuk bangkit melawan gelombang kemiskinan.

Sampai sejauh ini, di berbagai pemerintah daerah di Indonesia, belum banyak desa atau keluarahnya yang benar-benar turut merespon adanya regulasi terkait dengan perencanaan pembangunan partisipatif. Meski sudah diatur dalam Permendagri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, kenyataannya tidak semua desa di Indonesia memiliki dokumen RPJMDes.

Menurut Abdur Rozaki, setidaknya akan ditentukan oleh dua hal untuk mewujudkan desa atau kelurahan yang siap menyusun RPJMDes dan RKPDes secara partisipatif. Pertama, komitmen

pemerintah daerah untuk menyediakan dukungan pendanaan, fasilitasi dan perangkat teknis lainnya. Kedua, keaktifan warga dan organisasi warga sendiri untuk mau belajar merumuskan dokumen perencanaan pembangunan demi kemajuan di desanya. Karena suara warga adalah suara pembangunan. 📌

Fathor Rahman MD

RPJMDes dalam Regulasi

Secara teoritis, penyusunan RPJMDes dengan semangat partisipasi warga merupakan indikasi awal akan terwujudnya demokrasi substansial. Dimana berjalannya sistem demokrasi yang mengarah pada terciptanya kesejahteraan bersama. Kerena masyarakat tidak lagi sekedar menjadi objek pembangunan, melainkan juga terlibat menentukan nasibnya sendiri, berkesempatan memutuskan pembangunan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Sebuah andaian tentang pembangunan yang tepat sasaran.

Secara administratif, dalam skema pembangunan nasional, keberadaan RPJMDes merupakan kewajiban bagi pemerintahan desa. Dimana hal itu telah diatur dalam undang-undang No. 25 tahun 2004. Kemudian lebih jauh diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 212 tentang Pemerintahan Daerah. Dan lebih spesifiknya diatur pada Peraturan Presiden (PP) No. 72 tahun 2005 tentang desa, dengan penjabaran Permendagri No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Dalam Pasal 64 ayat 1 PP 72/2005 diatur, bahwa perencanaan pembangunan desa mencakup RPJMDes untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) untuk jangka waktu satu tahun. RKPDes merupakan penjabaran dari RPJMDes. Dengan demikian, desa wajib memiliki dua dokumen itu. Akan tetapi, Permendagri tersebut tidak menyebut secara detail bagaimana sebaiknya dokumen RPJMDes disusun. Pijakan hukum tersebut tidak mengulas detail bagaimana panduan aplikatif bagi

pemerintah desa untuk menyusun kedua dokumen itu.

Secara empirik, sebelum masuknya Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Phase I beserta mitra kerjanya di wilayah Indonesia timur tahun 2006, hampir semua desa hanya memiliki RKPDes. Buruknya pula, mayoritas RKPDes yang ada merupakan "anak haram". Karena RKPDes terlahir bukan dari induknya RPJMDes, sebagaimana amanah PP 72/2005. Waktu itu pemerintah desa belum bisa menyusun dokumen RPJMDes. Dari data laporan studi RPJMDes Kabupaten Sumba Timur, "Suara Warga Suara Pembangunan", yang ditulis oleh Ferdinand Rondong dkk. (2010), di Kabupaten Sumba Timur, dari 140 desa dan 16 kelurahan hingga tahun 2006 belum ada pemerintahan desa memiliki dokumen RPJMDes.

Kenyataan lain yang banyak ditemui di beberapa daerah, kerap kali penyusunan RPJMDes dan RKPDes sekedar memenuhi tuntutan administratif, secara riil penyusunan RPJMDes jauh dari semangat demokrasi. Skema Musrembangdes sebagai momen pelibatan warga dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes hanya berlangsung sekedar formalistik dan elitis. Musrembangdes dilaksanakan tanpa ada persiapan masyarakat secara memadai. Sehingga peserta yang hadir didominasi oleh tokoh-tokoh atau elit desa, kecamatan dan kabupaten. Musrembangdes hanya menjadi momen sambutan bergilir para elit desa. Dan warga hadir sebagai pendengar setia. 📌

Fathor Rahman MD

Kenapa
Saya harus
 Beriklan di majalah
FLAMMA ?



DIDISTRIBUSIKAN ke komunitas masyarakat desa dampingan IRE di seluruh Indonesia, terutama di Jateng-DIY, LSM mitra se-Indonesia, pusat studi, perpustakaan sejumlah kampus, lembaga donor, serta kedutaan besar sejumlah negara.

SEBARAN majalah mencapai sebagian besar wilayah Indonesia.

Memuat **LAPORAN JURNALISTIK** mendalam dan publikasi

PENELITIAN perihal desentralisasi, politik lokal, dan tata kelola (*governance*).

DITULIS dengan bahasa **SEDERHANA-POPULER** sehingga dipahami pembaca dari beragam kalangan.

Berita dan tulisannya dijadikan **BAHAN REFERENSI** dan **SUMBER INFORMASI**.

Oplah mencapai **2000** eksemplar

Dikerjakan secara **PROFESIONAL** oleh aktivis LSM yang memiliki pengalaman jurnalistik

Sasaran Pembaca:
 LSM/NGO
 Dosen dan Mahasiswa
 Pusat studi dan advokasi
 Lembaga donor
 Kedutaan besar
 Aparat Desa
 Masyarakat Desa
 Pemerintah daerah
 DPRD

No	UKURAN	PENEMPATAN	WARNA	TARIF
1	1 Halaman 22 X 28 Cm	Cover Depan Dalam	FC	Rp 650,000.00
2	½ hal Horizontal 11 X 14 Cm	Cover Depan Dalam	FC	Rp 325,000.00
5	1 Halaman 22 X 28 Cm	Cover Belakang	FC	Rp 1,150,000.00
6	½ Hal Horizontal 11 X 14 cm	Cover Belakang	FC	Rp 700,000.00
7	1 Halaman 22 X 28 cm	Cover dalam Belakang	FC	Rp 700,000.00
8	½ Hal Horizontal 11 X 14 cm	Cover dalam Belakang	FC	Rp 400,000.00
11	1 Halaman 22 X 28 Cm	Halaman Dalam	FC	Rp 450,000.00
12	½ Halaman 22 X 28 Cm	Halaman Dalam	FC	Rp 250,000.00
16	1 Halaman 22 X 28 cm	Advetorial	B/W	Rp 600,000.00
17	½ Halaman Horizontal 11 X 14 cm	Advetorial	B/W	Rp 300,000.00



Geliat EKONOMI DESA

Fakta menunjukkan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia sebagian besar tinggal di desa. Tidak mau sekedar meratapi kenyataan tersebut, beberapa desa di Indonesia Timur mulai merintis jalan untuk membangkitkan aktivitas ekonomi di desa.

Foto: beritadaerah.com

Berdasarkan data BPS (September, 2012), jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai 29,13 juta orang (11,96 persen). Data tersebut juga merilis bahwa sebagian besar (63,45 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan. Menilik pada data tersebut, terlihat jelas bahwa kehidupan warga desa secara umum masih belum beranjak ke level sejahtera. Memang program penanggulangan kemiskinan sudah mampir ke desa. Sayangnya, program yang ada lebih cenderung bersifat *pro poor*, misalnya bantuan beras dan sebagainya yang menolong orang miskin hanya sesaat tetapi belum mampu mengangkat derajat ekonomi orang miskin menjadi lebih baik.

Salah satu langkah nyata dalam mengurangi angka kemiskinan di pedesaan adalah mendorong pengembangan ekonomi lokal misalnya dengan membentuk lembaga ekonomi pedesaan. Sebagai contoh, di daerah Kabupaten Takalar dibentuk Federasi atau Asosiasi Kelompok Usaha untuk membangun kekuatan ekonomi lokal di tingkat pedesaan. Masing-masing kelompok usaha tersebut dimaksudkan agar keuntungan dapat berpihak bagi pelaku ekonomi desa. Adapun dasar pembentukan kelompok usaha ini adalah, masyarakat di kabupaten Takalar ingin memulihkan serta menumbuhkembangkan kembali ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan segenap kekuatan dan potensi daerah yang dimiliki.

Dengan mengetahui potensi yang ada, masyarakat setempat dapat mengembangkan potensi yang dimiliki untuk mengembangkan ekonomi lokal. Salah satu contohnya di desa Soreang, Kecamatan Mappakasungu, Kabupaten

Takalar. Disana dibentuk kelompok usaha dengan nama Kelompok Abbulosibatang yang mengembangkan usaha budidaya garam. "Potensi yang ada di desa tersebut adalah garam, sehingga mereka memanfaatkan budidaya garam untuk mengembangkan ekonomi mereka," ujar Puji Qomariyah, salah satu peneliti tamu di IRE.

Asosiasi Kelompok Usaha Produktif (KUP) tersebut melibatkan semua unsur, baik pemerintah desa setempat, dinas koperasi, Bappeda, maupun kelompok usaha ekonomi yang ada di masyarakat. Puji Qomariyah mengatakan, KUP tersebut dibangun untuk menjadi rintisan BUMDes. Sebenarnya, lanjut Puji, untuk mengembangkan inovasi ekonomi lokal, masyarakat harus mengetahui dan mampu memetakan potensi yang ada di desanya. "Potensi yang ada di desa dimanfaatkan untuk perekonomian," ujarnya. Seperti di kecamatan Goa, Kabupaten Takalar Makassar yang menjadi daerah penelitiannya, masyarakat sudah mengetahui potensi masing-masing desa. Sebagai contoh di desa Soreang, terdapat garam yang bisa dijual untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Di kabupaten Takalar juga memiliki potensi dalam sektor perikanan dan pertanian.

Biasanya usaha garam tersebut banyak dilakukan oleh perempuan. Sebelum ada kelompok usaha ini, mereka menjual garamnya dengan harga murah. Namun, dengan adanya kelompok usaha ini, mereka bisa menjual garamnya dengan harga yang tinggi. Hal ini karena kelompok usaha ini dapat mengatur cara penjualannya. Akan tetapi, mereka masih sangat terisolasi dari pemerintah. Pemerintah

melakukan pembiaran kepada mereka. Kesehatan dan pendidikan, tidak menjadi perhatian bagi pemerintah untuk warga disana. Meskipun demikian, masyarakat disana tetap merintis usaha mereka dengan melihat potensi disana. Namun, permasalahannya adalah mereka masih sulit untuk memasarkannya karena kesulitan untuk mengakses pasar. Dengan adanya Kelompok Usaha Produktif (KUP), diharapkan akan mengembangkan ekonomi lokal dan dapat meningkatkan perekonomian pedesaan. "KUP yang nantinya menjadi rintisan BUMDes, akan menjadi pengembangan ekonomi di tingkatan desa," ujar Puji. Dengan mengikuti kelompok usaha produktif tersebut, mereka juga dapat terlepas dari jeratan rentenir.

Dengan asosiasi ini, pemerintah dan pelaku ekonomi desa dapat saling berkomunikasi satu sama lain dalam menjalankan program dan roda perekonomiannya. Pemerintah juga mempunyai peran penting dalam asosiasi ini. Dalam hal ini pemerintahan desa adalah salah satu elemen yang ikut terlibat didalamnya. Pemerintah tidak hanya sekedar memberikan usaha semata, namun lewat asosiasi kelompok usaha ini, diharapkan dapat memproteksi produk-produk lokal dan dapat membantu memasarkan produk mereka lewat peraturan desa.

Sementara itu, untuk mendorong kemajuan perekonomian pedesaan, perlu dibentuk BUMDes. Sebenarnya, desa bisa berinisiatif membuat atau membentuk BUMDes karena dapat mencukupi kebutuhan dasar masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Borni Fadlan, peneliti IRE, saat ditemui majalah Flamma di tengah

kesibukannya. Menurut Borni, BUMDes bisa dibentuk oleh desa yang berasal dari berbagai unit usaha desa. Namun, masing-masing unit usaha tersebut tidak boleh mematikan satu sama lain. "Secara ekonomi, BUMDes dapat dibentuk oleh desa dengan memanfaatkan aset desa. Dengan catatan, unit-unit desa tersebut tidak membangun monopoli satu sama lain. Yang penting dalam ekonomi kerakyatan adalah adanya trust atau modal sosial. Selain itu, misi sosialnya adalah bukan semata-mata mencari profit," lanjut Borni.

Borni menekankan, BUMDes sudah mempunyai landasan hukum yang tercermin dalam UU No. 32/2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.72/2005. Dalam undang-undang dan peraturan tersebut dijelaskan mengenai kedudukan, tujuan, kelembagaan maupun kepemilikan BUMDes. Sedangkan tata cara pembentukan BUMDes di daerah diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Hal itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. (Lihat Box)

Sementara itu, di daerah kabupaten Bantaeng-Provinsi Sulawesi Selatan, proses pembentukan BUMDes dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti tamu IRE, Sri Roviana, MA, Pemerintah daerah Bantaeng juga berperan dalam proses pembentukan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 10/2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes dan diperkuat dengan adanya SK Bupati No. 411/2008 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes). Dalam Perda tersebut disebutkan tujuan didirikannya BUMDes adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. BUMDes didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa setempat.

Di Kabupaten Bantaeng, proses pembentukan BUMDes juga membutuhkan peran dari NGO. Pendampingan dilaksanakan oleh Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil (Jaringmas) yang secara rutin memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap pengurus BUMDes, baik secara formal maupun secara non-formal.

Pada tahun 2008, ACCESS melakukan pendampingan kepada masyarakat yang bekerjasama dengan pemerintah daerah. Pendampingan tersebut dilakukan dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pengurus BUMDes. Hal ini menjadi salah satu upaya NGO lokal dalam pengentasan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi lokal. Dalam hal ini, ACCESS memberikan penguatan dan pembinaan serta mendorong mensinergikan pengelolaan aset-aset desa.

Adapun permodalan untuk dana BUMDes, lanjut Borni, dapat berasal dari pemerintah desa dan kepemilikan desa. Sebelumnya harus dilakukan perencanaan, misalnya mempersiapkan sumber daya alam dan sumber daya manusianya untuk pra-kondisi sebuah desa dalam membangun BUMDes. "BUMDes itu permodalannya dari pemerintah desa, dan ini menjadi kepemilikan desa," ungkapnya. Jumlah BUMDes di Kabupaten Bantaeng adalah 20 BUMDes.

Pada tahun 2011, masing-masing BUMDes menggunakan modal sebesar

80 juta rupiah. Total modal yang dikeluarkan untuk 20 BUMDes ada 1,6 Milyar. Adapun keuntungan yang didapat dari total BUMDes yang ada adalah Rp. 103.268.436,-. Keuntungan tersebut digunakan untuk Kas Pendapatan Asli Desa, dana operasional pengurus, dana sosial, pemupukan modal dan biaya resiko lainnya. Penguatan modal BUMDes dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Kegiatan Usaha (RKU) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing BUMDes. Setiap BUMDes memiliki core bussiness berdasarkan potensi desa di mana BUMDes tersebut berada.

Adapun modal awal pembentukannya dialokasikan oleh Bupati Bantaeng ke masing-masing BUMDes sebesar 100 juta rupiah dengan jumlah total 46 desa, sehingga total APBD untuk BUMDes adalah 6,4 M. Hal ini menjadi bagian dari usaha untuk mewujudkan agenda dari Bupati Bantaeng periode 2008-2013 yang memiliki visi: "mewujudkan desa mandiri". Hal ini menjadi peran pemerintah dalam membangun inovasi ekonomi lokal. Dengan visi tersebut, yang salah satu indikatornya adalah memperkuat lembaga ekonomi lokal, maka diharapkan hal ini akan menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa yang nantinya akan memfasilitasi dalam berbagai sektor usaha, dari proses produksi hingga pemasarannya. "Dengan adanya BUMDes, maka diharapkan dapat memperlancar dan mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga ekonomi di desa bisa menggeliat," ujar Borni. 📍

Anik Susiyani

Memahami BUMDes

Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disebut dengan BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39/2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Tujuan dibentuknya BUMDes dalam peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Adapun Usaha Desa yang dimaksud dapat berupa jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.

Sementara itu, syarat pembentukan BUMDes dalam peraturan tersebut beberapa diantaranya adalah adanya potensi

usaha ekonomi masyarakat, tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa, dan adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. Selain itu, hal itu juga bertujuan agar dapat meningkatkan ekonomi lokal di pedesaan sehingga dapat mensejahterakan warga masyarakat setempat.

Beberapa syarat pembentukan BUMDes adalah adanya potensi usaha ekonomi masyarakat, tersedianya sumber daya desa atau kekayaan desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa, serta adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi. 📍

Anik Susiyani

PEREMPUAN yang Menggerakkan DESA

Sepuluh tahun lalu, bagi perempuan pengrajin kain tenun di Lombok Tengah mendapatkan penghasilan 3-4 kali lipat laba mungkin sulit dicapai. Namun, kini uang satu juta per-bulan bukan keniscayaan setelah para perempuan pengrajin tenun terlibat dalam ASPPUK (Asosiasi Perempuan Pengusaha Kecil).

Permasalahan perempuan di Lombok Tengah pada dekade lampau, tampaknya juga menjadi permasalahan sebagian besar perempuan desa di seluruh Indonesia. Perekonomian negara yang masih belum bisa bangkit dari krisis ekonomi akibat hantaman krisis moneter 1997-1998, membuat mereka bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan yang semakin melonjak tinggi. Tidak hanya kebutuhan sandang dan pangan, kebutuhan akan modal usaha bagi sebagian besar masyarakat Indonesia ketika itu bisa dikatakan terseok-seok.

Tidak hanya bangun dari krisis perekonomian, kaum perempuan pasca reformasi saling bahu membahu bangun dan berdikari sebagai perempuan mandiri. Perempuan yang dapat lepas dari marjinalisasi sistem patriarkhi. Pasca terbukanya kran reformasi di segala level, menjadikan kaum perempuan lebih leluasa berserikat dan berkumpul. Berbicara demokrasi dan segala proses pembangunan yang mengikutinya, seakan tidak menjadi tabu lagi. Maka tidak jarang, gerakan kaum perempuan mengemuka di mana-mana. Hingga pelosok desa.

Pengentasan kemiskinan tidak diragukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah. Saat ini mulai dari pemerintah pusat hingga di level kabupaten dan

desa telah berlomba-lomba merancang program yang mengarah pada upaya menekan angka kemiskinan. Namun, hingga kini angka kemiskinan di desa terbilang masih tinggi. Berdasarkan data BPS (September, 2012), jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai 29,13 juta orang (11,96 persen). Data tersebut juga merilis bahwa sebagian besar (63,45 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan.

Begitupula bagi kaum perempuan. Persoalan pengentasan kemiskinan tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Perempuan melalui wadah sosial-konstruktif-kreatif dapat menjadi terobosan sosial-ekonomi peningkatan pendapatan ekonomi keluarga. Himpitan ekonomi membuat para perempuan tidak hanya tinggal diam. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, sebagaimana di kutip dalam official web kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia (<http://menegpp.go.id/diakses> pada 8 September 2012), perempuan di negara berkembang secara ekonomi yang menjadi faktor pendorong perempuan dalam membuka usaha. Inovasi yang mereka lakukan tersebut lazimnya dibuka untuk mencukupi hidup atau menjadi bagian

dari tulang punggung ekonomi keluarga, dan bukan semata-mata sebagai aktualisasi diri perempuan.

Dalam sambutannya pada acara Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada 30 Juni 2012 di St. Petersburg, Rusia, Linda Amalia Sari Gumelar dalam rilis sebagaimana dimuat dalam situs resmi kementerian (<http://menegpp.go.id/diakses> pada 8 September 2012) menyatakan bahwa "peranan perempuan sesungguhnya sangatlah luas dalam ekonomi, tidak hanya untuk memperkuat ketahanan dan mengurangi dampak gonjang ganjing ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam pemulihan ekonomi dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif."

Pentingnya peranan perempuan dalam pembangunan ekonomi belum didukung sepenuhnya oleh kebijakan pemerintah. UU perkawinan misalnya, sering digunakan menjadi senjata dalam kasus KDRT. Dalam persidangan seringkali pelaku (suami) menggunakan pasal mengenai pembagian peran suami istri. Sementara itu juga serentetan Undang-Undang yang didesak untuk segera direvisi, seperti UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Perdagangan Orang, UU Kewarganegaraan, dan UU Perkawinan, menegaskan bahwa perempuan seringkali terabaikan dan tidak diperhatikan oleh pemerintah dalam pembuatan kebijakan. Program yang ada dari waktu ke waktu seringkali bias dan hanya berpihak kepada laki-laki. Bias ini menurut Nur Iman Subono, (Jurnal Perempuan edisi 48/2005 diterbitkan oleh Yayasan Jurnal Perempuan), sangat berkaitan dengan keyakinan adanya pemisahan antara ruang publik dan ruang privat. Ruang publik adalah tempat laki-laki, baik secara sosial, politik maupun ekonomi. Ruang privat adalah ranah perempuan, tempat mereka hadir dan beraktivitas.

Inovasi Perempuan Mandiri

Di beberapa daerah di Indonesia, gerakan pemberdayaan kaum perempuan terutama dalam ekonomi mulai muncul. Ironinya, di beberapa daerah justru terlihat “membiarkan” para perempuan sebagai arena eksploitasi ekonomi. Lihat saja misalnya, tiap tahun para pekerja wanita yang mencari nafkah ke luar negeri tidak kunjung menipis. Walaupun tidak sedikit yang sukses dan membawa kabar gembira pada sanak keluarga di desa, namun tidak sedikit pula adanya tenaga kerja wanita Indonesia mengalami diskriminasi, eksploitasi, dan segala macam tindakan negatif lainnya. Apalagi sebagian besar mereka bekerja di sektor informal dengan perlindungan hukum yang minim.

Demi menunjang perekonomian keluarga mungkin tidak musti harus ke luar negeri sebagai TKW (tenaga kerja wanita). Anggapan minimnya lahan kerja di daerah atau di desa barangkali dapat terselesaikan dengan adanya kesalingterpautan antar berbagai elemen menuju pembangunan masyarakat sejahtera. Bila kaum perempuannya sadar serta didukung dengan kebijakan pemerintah melalui pemberdayaan mandiri, tidak menutup kemungkinan arah pembangunan daerah atau desa lebih maju dan unggul.

Di Indonesia Timur, tidak sedikit ditemukan kelompok-kelompok pembangunan berasal dari sekumpulan perempuan. Di Lombok Tengah misalnya, melalui program ACCESS tahap II, para perempuan bersekerit dengan membentuk ASPPUK. Dari ASPPUK ini lahir beberapa PUK (Perempuan Usaha Kecil) di berbagai desa. Pembentukan ASPPUK tidak lepas dari peran berbagai pihak (*multistakeholders*) dalam penanggulangan kemiskinan di Lombok Tengah melalui pemanfaatan dan penguatan komunitas masyarakat (*community development*).

Dina Mariana, peneliti IRE, mengatakan bahwa ASPPUK melalui program penguatan PUK melakukan pengorganisasian dengan mendorong lahirnya PUK-PUK lainnya serta membuat jaringan antara PUK, disamping mendorong berkembangnya KPUK. Hingga saat ini ada penambahan jumlah KPUK, dari 120 KPUK, sekarang sudah menjasi 151 KPUK, dimana awalnya jumlah PUK hanya 1.306 orang sudah menjadi 1.673 orang, yang terdiri dari 200 orang penun, 281 orang pengrajin ketak dan rotan, 1192 anggota yang memiliki jenis usaha bakulan, jasa, petani, peternak, home industri.

Kemiskinan yang masih terbilang tinggi membuat perempuan di Lombok Tengah harus berpikir keras untuk tetap

bertahan hidup. Berbagai cara mereka lakukan untuk survival, ada yang berdagang, bercocok tanam, membuat berbagai kerajinan (home industry), serta meneun. ASPPUK melakukan pengorganisasian dengan mendorong lahirnya PUK-PUK di daerah lain yang belum terbentuk, serta membuat jaringan antar PUK, disamping mendorong berkembangnya KPUK.

Perempuan-perempuan yang tergabung dalam PUK ini dibekali berbagai pengetahuan untuk semakin mengembangkan usahanya. Bukan hanya pengetahuan berupa pendidikan keterampilan saja, melainkan juga difasilitasi untuk mengembangkan kegiatan yang mengacu pada nilai-nilai partisipasi, transparansi, serta berpihak kepada orang miskin, perempuan, dan kelompok marjinal lainnya. Jaringan PUK ini juga diajak untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran desa hingga daerah. Hal ini diharapkan agar kedepan bisa memperkuat partisipasinya dalam pembangunan baik di level desa maupun daerah.

PUK yang merupakan *civil society* ini ternyata tidak hanya menambah penghasilan para anggotanya. Namun juga telah memiliki arti penting dalam upaya mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lombok Tengah. Kerja-kerja yang dilakukan oleh masyarakat, diyakini telah mempercepat kenaikan IPM Lombok Tengah yang masih jauh dari rata-rata IPM nasional. Setelah adanya PUK, terbukti IPM di Lombok tengah meningkat, yang semula pada tahun 2005 hanya 57,90 kemudian pada tahun 2009 mampu menembus angka 60,26.

Kerja-kerja yang diinisiasi di tingkat lokal memiliki arti penting dalam membangun sinergi dengan program-program pemerintah daerah, termasuk dalam program pengentasan kemiskinan. Kemitraan yang dijalin antara *civil society* seperti PUK, telah bersinergi dengan program pemerintah. Sehingga kekuatan yang digalang bersama tersebut telah membawa banyak perubahan dan kemajuan yang cukup penting. Dampaknya, bukan hanya memberi kemajuan dan perubahan terhadap angka kemiskinan di Lombok Tengah, melainkan lebih jauh mendorong lahirnya kemandirian desa.

Perempuan Penggerak

Pertumbuhan ekonomi berbasis gerakan perempuan di desa tidak hanya terlihat di Lombok Tengah. Berbagai sektor pengelolaan sumber daya alam dengan pola partisipasi perempuan desa

terlihat misalnya di kota Baubau dengan kader perempuan penggerak Posyandu, kabupaten Buton Utara dengan Lembaga Ekonomi Perempuan (LEP), di kabupaten Takalar dengan menitikberatkan pada skema one village one product, serta beberapa desa di bagian Indonesia Timur lainnya. Walau kadang dengan dana terbatas, para perempuan penggerak desa terus berupaya memupuk kemandirian demi perbaikan ekonomi berkelanjutan.

Di desa Soreang terdapat kelompok petani garam yang mayoritas anggotanya ialah perempuan. Mereka yang terkumpul dalam Kelompok Usaha Produktif (KUP) Abbulosibatang secara bertahap melakukan optimalisasi modal sosial warga. KUP Abbulosibatang yang pada awalnya beranggotakan 29 orang (22 perempuan dan 7 laki-laki) menyaliasi pengusahaan modal usaha dan penjualan hasil panen sebagaimana umum berlaku dalam koperasi. KUP memberlakukan simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Secara tidak langsung KUP Abbulosibatang juga berperan dalam mengatur ritme penjualan hasil panen garam di pasar.

Adanya KUP ini sedikit banyak memberikan peluang besar terbangunnya ekonomi desa yang berkesinambungan. Hasil penelitian Puji Qomariyah (peneliti tamu IRE) dan Borni Kurniawan (peneliti IRE) dalam “Perempuan Soreang Melawan Rezim Pasar Uang,” pada medio Februari lalu, menyebutkan bahwa KUP memberikan kemanfaatan cukup signifikan. Pertama, KUP mendorong kaum perempuan untuk terlibat dalam usaha ekonomi produktif secara bersama-sama. Kedua, KUP menjadi kekuatan alternatif di tengah pebisnis uang yang diperankan lembaga keuangan komersial. Ketiga, KUP memberlakukan sistem tunda jual garam dengan harga di atas harga pasar.

Demi mewujudkan pembangunan desa berkelanjutan, peran kaum perempuan diharapkan menjadi tiang pondasi. Salah satunya dapat berupa maksimalisasi *local economic development community* berbasis perempuan yang bertebaran di desa-desa. Penguatan kapasitas kader perempuan penggerak merupakan hal esensial dalam pembangunan perekonomian masyarakat desa. Seperti dirasakan oleh Ibu Samirah, warga desa Wa Ode Angkalo, kab. Buton Utara. Ia merasakan manfaat pengembangan sinergis Lembaga Ekonomi Perempuan “Amanah” di desa Wa Ode Angkalo. Melalui LEP, para perempuan desa membangun kemandirian perekonomian keluarganya dengan kegiatan dan usaha ekonomi produktif. 📍

Melani Jayanti dan Mohammad Fathollah



Foto: Dok. Foto facebook.farid

Farid Hadi Rahman

(Senior Technical Officer Documenting-Influencing-Profiling of ACCEESS)

“Desentralisasi Harus Sampai ke Desa..”

DPerkembangan terkini, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa banyak yang ditata ulang guna memberi ruang lebih besar kepada warga untuk ikut serta secara lebih aktif membangun desa. Akan tetapi rumusan tersebut acap berakhir dengan menafikan perencanaan strategis warga. Musrenbangdes misalnya, ketika dibawa ke ranah yang lebih tinggi dapat berubah drastis sesuai dengan kepentingan elit pemerintahan daerah atau kabupaten.

Lantas bagaimana Musrenbangdes atau rembug desa diaktualisasikan sehingga menjadi jalan utama dalam pembangunan desa berkelanjutan? Serta

bagaimana menjamin representasi segmen masyarakat lebih luas dalam Musrenbangdes? Berikut wawancara *Mohamad Fathollah dan Fathor Rahman MD (Flamma) dengan Farid Hadi selaku STO DIP (Senior Technical Officer for Documentary Infrastructure and Profiling) ACCESS Program, AusAID* awal Agustus silam.

Apa yang dimaksud Musrenbangdes dan bagaimana praktiknya sejauh ini?

Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) merupakan proses revitalisasi pembangunan desa yang tidak lain turunan dari ekspektasi rapat koordinasi pembangunan (Rakorbang) pada Orde Baru. Secara prin-

sip, keduanya sama. Akan tetapi, secara praktik cukup berbeda. Musrenbang sebenarnya wadah yang diharapkan menjadi pola perencanaan baik yang direncanakan dan dikelola pemerintah desa bersama-sama masyarakat (warga).

Satu hal yang menarik juga untuk dicermati bahwa antara Musrenbang desa dengan apa yang diolah dalam masyarakat itu sering tidak ketemu. Walaupun telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, dalam praktiknya acap hasil Musrenbang tidak ketemu dengan kepentingan riil masyarakat. Hal ini menarik dicermati sebagai upaya kritik sosial-struktural dalam pembangunan desa. Di-

samping Musrenbang menjadi semacam formalitas, adanya tumpang tindih dari peraturan lain yang ikut mengakomodasi menjadi soal lain untuk dikritisi.

Kenapa bisa tidak ketemu?

Ini karena Pemerintah punya kebijakan Musrenbangdes dan di sisi lain juga punya metode perencanaan pembangunan melalui PNPB Mandiri. Sehingga kepentingan dua hal itu acap tumpang tindih. Dalam konteks pemberdayaan itu tentunya kurang baik dan kurang positif. Oleh karena itu, muncul rumusan strategis yakni integrasi perencanaan. Sekitar dua tahun ini, mulai muncul suatu proses yang diharapkan untuk diintegrasikan. Musrenbangdes yang berkembang di desa cukup satu kali saja.

Lantas, Apa perbedaan substansial Rakorbang dengan Musrenbang?

Pada jaman Rakorbang dulu, saya lihat tidak ada satu pembaharuan sehingga ada beberapa teman yang mulai mengkritisi apakah memang Musrenbang itu diperlukan. Kalau hanya melahirkan kekecewaan tiap tahun itu berarti belum begitu bermanfaat. Penganggaran partisipatif di sini diperlukan sebagai langkah integral dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan desa. Jadi Musrenbang tidak menjadi semacam formalitas. Pengusulannya dari bawah, akan tetapi hasil pembahasan atau penentuan program ditentukan oleh pusat.

Dalam praktik pengusulan bottom up semacam itu tidak menjadikan warga semakin maju. Malah seakan-akan dibodohi oleh dan atas kepentingan yang bernama Musrenbangdes. Harus ada langkah progresif dari semua elemen terkait untuk tidak menjadikan Musrenbangdes sebagai formalitas semata. Pemerintah pusat ataupun kabupaten seyogianya memberikan pemahaman positif dan berkesinambungan terkait perencanaan dan pengelolaan kebutuhan desa.

Lantas apa sebetulnya tujuan Musrenbangdes bagi pembangunan desa?

Musyawarah pembangunan desa itu tujuan pentingnya adalah untuk pembangunan desa. Bukan untuk kepentingan kepala desa. Artinya dia dikemas untuk kepentingan pembangunan desa dan bagaimana pemerintah desa dan warga desa melaksanakannya sendiri secara bersama-sama. Sebab desa mempunyai kewajiban untuk membuat peren-

canaan dan penganggaran. Kalau berkaca pada regulasi tentang desa yakni PP No. 72/2005, desa mempunyai satu perintah yakni harus membuat perencanaan tahunan berkelanjutan.

Seharusnya yang namanya Musrenbangdes itu ditujukan kepada kepentingan desa sendiri, membuat RKPDes yang dilaksanakan dengan APBDes. Akan tetapi yang terjadi karena selama ini yang punya uang adalah Pemda, maka seolah-olah yang namanya Musrenbangdes hanya usulan untuk kabupaten yang akan dilaksanakan oleh RKPDes dan dikoordinir oleh Pemda.

Sebenarnya persoalannya disitu, di kampung, di tempat lain, di desa, di Jawa di luar Jawa, kalo melihat yang namanya Musrenbang itu lebih banyak pada harapan ke luar, maksudnya adalah mimpi untuk diberikan atau diusulkan ke pemerintah kabupaten. Jika Pemkab tidak bisa membiayai maka ke propinsi. Propinsi tidak bisa maka ke pusat. Sementara APBD di deas kecil sekali. Janganaget ada desa yang menerima hanya 10 juta. Itu 10% dalam implementasi dari bagi hasil APBD dan diturunkan lagi pada anggaran yang lebih kecil. Kepentingan anggaran 10 % itu seolah-olah menjadi hak desa, tapi menjadi milik bupati. Secara tidak langsung ini mempengaruhi proses Musrenbangdes. Antara perencanaan dan anggaran mestinya ketemu menjadi satu.

Jadi desa bisa membuat RKPDes (rencana kerja pemerintah desa) dan membuat APBDes (anggaran pendapatan dan belanja desa) sendiri sesuai dengan kebutuhan desa. Jalur penganggaran yang jelas dapat mempertemukan Musrenbangdes pada ranah yang sesuai dengan kepentingan desa. Bila semua diserahkan pada supra desa, SKPD (satuan kerja pemerintah daerah) bisa jadi mati dan tidak bisa berbuat apa-apa.

Kalau di luar Jawa, misalnya Aceh, bagaimana perkembangan disana?

Di Aceh, kita menyebutnya Gampong (nama untuk desa-red). Pasca gempa dan tsunami di Aceh atau pasca rekonsiliasi Helsinki, pengakuan terhadap Gampong sudah mulai ada. Pembentukan Gampong dengan segala infrastruktur pemerintahannya telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nanggroe Darussalam No. 7/2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Tujuan peraturan daerah ini adalah untuk membakukan, mendorong, menunjang, dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan

kehidupan adat istiadat dan hukum adat di daerah.

Skema musyawarah perencanaan juga diatur di dalam perda tersebut, misalnya Rapat Adat Gampong. Yang dimaksud Rapat Adat Gampong adalah rapat adat yang terdiri dari unsur-unsur Tuha Peut Gampong dan pemuka Adat lainnya yang terkait. Sedangkan yang dimaksud musyawarah adat adalah suatu penyelesaian yang dilaksanakan oleh Tuha Peut Gampong yang dihadiri oleh para pihak terkait. Karena semua penganggaran perda tersebut sebagian besar dari APBN dan APBD, maka anggaran yang diperoleh tidak lebih sama dengan desa-desa yang lain.

Secara umum, pelaksanaan perencanaan lokal di beberapa Gampong di Aceh sudah mulai berkualitas. Di Aceh Barat atau Aceh Besar juga sudah mulai terlihat berkualitas dan berjalan dengan baik. Namun tidak berarti ada beberapa kendala-kendala non-teknis, misalnya menyangkut keterlambatan setiap individu. Walaupun demikian, pelaksanaan musyawarah perencanaan di Gampong saat ini berproses lebih maju.

Skema macam apa yang menurut Anda praktis agar Musrenbang berjalan efektif?

Desentralisasi. Desentralisasi ini harus sampai ke desa. Artinya desa diberi wewenang, pendidikan desa misalnya, atau pendidikan-pendidikan formal lainnya yang dapat mengarah pada pembangunan desa berkelanjutan dan berkeadilan. Kemudian desa diberi anggaran keuangan yang memadai dengan tata kelola yang baik. Dari tahapan tersebut dapat dilaksanakan sebuah perencanaan yang partisipatif. Mengajak semua komponen desa untuk ikut serta dalam proses pembangunan desa. 🗉

Lemahnya Negara, Kuatnya Politik Keluarga:

Politik Lokal di Filipina

Pertanyaan yang kerap muncul saat saya melakukan riset di Filipina selama satu tahun (2011-2012) terkait dengan Politik Ingatan Pasca Rejim Marcos adalah bagaimana situasi sosial-politik di negerinya Manny Pacquaio tersebut? Apakah Filipina memiliki kemiripan dengan Indonesia? Pertanyaan ini penting, meskipun tak mudah dijawab. Hal ini merupakan cerminan untuk merefleksikan diskursus demokrasi di Asia Tenggara yang memiliki kekhasan masing-masing. Ketidakmudahan untuk menjawab pertanyaan ini lebih terkait dengan beragam variabel yang mesti dijelaskan dan kompleksitas yang dialami kedua negara tersebut, baik dalam konteks sejarah kolonialisme yang sedikit banyak mewarisi “watak” politik-kebudayaan mereka, letak geografis antara satu daerah dengan daerah yang lain dalam cangkupan masing-masing negara, dan tarik-menarik antara tradisi dan modernitas yang membentuk aliran politik tertentu pada level elit politik hingga hubungan mayoritas dan minoritas dalam populasi masyarakat di mana basis agama dan etnik turut menentukan wajah dominan kewarganegaraan mereka.

Secara garis besar, ada dua kemiripan. Pertama, kedua negara tersebut pernah mengalami masa kelam di bawah rejim otoriter; Indonesia di bawah rejim Soeharto (1967-1998) dan Filipina dalam rejim Ferdinand Marcos (1965-1986). Kedua, pasca jatuhnya dua rejim tersebut, kedua negara ini mengalami fase keadilan transisi yang buram. Selain minimnya penyelesaian kejahatan masa lalu sebagai mandat gerakan perubahan yang dilakukan masyarakat sipil untuk menatap masa depan negara yang lebih baik, fase transisi ini “dimanfaatkan” dengan baik oleh sekelompok elit dalam mengumpul-kan kekuatan sisa-sisa rejim masa lalu untuk menyandera demokrasi sesuai dengan kehendak mereka. Akibatnya, Pemilu sebagai simbol utama pesta demokrasi partisipasi masyarakat dalam berpolitik dijadikan ruang tukar menukar kekuasaan ketimbang menyuarakan kedaulatan hak sipil dan ekonomi masyarakat. Bertolak dari perbandingan singkat di atas, artikel ini ingin menyelidik struktur politik Filipina dengan menjadikan tragedi pembantaian Maguindanou sebagai studi kasus politik lokal.

Tantangan terbesar demokrasi yang dihadapi sebagian besar masyarakat Filipina sejak masa penjajahan Spanyol hingga

kini adalah dominasi politik keluarga yang menguasai daerah, provinsi, dan bahkan pada level nasional. Klan politik inilah yang menentukan kebijakan dan masa depan Filipina melalui akses dan jaringan kekerabatan yang dimiliki sebagai modal utama, meskipun secara prosedural, demokrasi sudah diterapkan melalui pemilihan langsung yang memungkinkan siapapun bisa menjabat posisi penting untuk menentukan kebijakan. Tapi, bandul kekuasaan berada di tangan dan jejaring elit politik keluarga. Situasi inilah yang diistilahkan Benedict Anderson (1988) sebagai *Cacique Democracy*, demokrasi yang ditentukan bos politik lokal yang berasal dari klan tertentu dengan kekuatan dinastinya sebagai mesin politik jejaring. Upaya menghancurkan dominasi politik keluarga sudah dilakukan pada masa jajahan Spanyol, yaitu dengan menguatkan aparatus birokrasi yang melibatkan kekuatan politik elit. Usaha itu gagal.

Di bawah jajahan Amerika Serikat, dinasti politik itu pernah coba diubah dengan melakukan desentralisasi melalui sistem demokrasi elektoral dengan mendistribusikan otonomi lokal yang berpatronase dengan Amerika Serikat sebagai pemegang otoritas tertinggi. Kebijakan ini justru menguatkan aspirasi politik elit Filipina dengan bertransformasi kekuatan mereka dari sekedar politik elit lokal menjadi pemain kelas provinsi dan nasional yang kemudian memanfaatkan sumber daya negara untuk diprivatisasi. Kondisi ini kemudian memunculkan jejaring keluarga antara elit politik selama pertengahan abad kedua puluh hingga menjadi oligarki tingkat nasional (McCoy, 2004). Di bawah rejim Ferdinand Marcos, jejaring politik keluarga sempat dikikis, yang kemudian Ia ganti dengan struktur dinasti baru, dengan menempatkan anggota keluarga dan sanak familinya ke dalam posisi penting jabatan publik dan perusahaan-perusahaan negara. Jatuhnya rejim Marcos dengan naiknya Cory Aquino sebagai Presiden Revolusi melalui jalan kekuatan rakyat (*People Power*), 22-25 Februari, 1986, memulihkan dan mengkonsolidasikan kekuatan elit keluarga yang dahulu dicabik-cabik.

Kondisi ini tidak hanya melemahkan posisi negara, kuatnya dinasti keluarga membuat demokrasi di Filipina menjadi stagnan. Kelas menengah yang diharapkan menjadi penyeimbang menyuarakan demokrasi di tengah mengakarnya politik klan memilih bermigrasi untuk mencari penghidupan layak di luar negeri untuk sanak famili mereka, ketimbang memilih tinggal di Filipina dengan peluang kerja yang sempit. Dit-



**WAHYUDI AKMALIAH
MUHAMMAD**

Peneliti di Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya (PMB) LIPI.

Alumni International Peace Studies Dual Master Program, Ateneo de Manila University & University for Peace, Costa Rica.

ambah lagi dengan kemampuan bahasa Inggris yang dimiliki, mereka bisa bersaing di level internasional. Sementara kelas bawah, yang tak dapat berbuat banyak, hanya menjadi sekurup penggembira demokrasi ketimbang penggerak roda demokrasi. Diakui, upaya menantang politik klan, dengan alasan tertentu, sebenarnya pernah dilakukan berkali-kali oleh sekelompok masyarakat yang menginginkan perubahan dengan jalan pemilu lokal, tapi tetap menemui jalan terjal. Atas nama stabilitas kekuasaan klan keluarga, kandidat calon kuat penantang incumbent kerap dibunuh sebelum hari pemilihan lokal tiba melalui paramiliter yang selama ini alat pelengkap militer sejak masa rejim Marcos untuk menumpas gerakan kiri (Partai Komunis Filipina) dan kanan (MILF, Abu Sayyaf, RAM)

Kasus yang cukup fenomenal terkait perebutan kekuasaan antar klan di pilkada Filipina adalah tragedi pembantaian Maguindanao. Pada 23 November 2009, klan Mangudadatu bersama dengan sanak famili dan jurnalis ingin mendaftarkan Ismail Toto Mangudadatu sebagai calon Gubernur Maguindanao, kepulauan Mindanao, Filipina ke komisi pemilihan. Di tengah jalan, konvoi mereka diserang secara membabi buta oleh sekelompok paramiliter yang merupakan utusan dari Andal Ampatuan Jr, anak dari Andal Ampatuan Sr. Andal Ampatuan Jr adalah walikota Datu Unsai, yang ditasbihkan akan mewarisi jabatan ayahnya sebagai Gubernur Maguindanao. Serangan itu berakibat pada meninggalnya 58 orang yang terdiri dari isterinya Ismail Toto, adik, anak dan pembantunya, orang yang sekedar lewat yang dianggap bagian dari konvoi, dan para jurnalis. Serangan itu merupakan bentuk kemarahan terkait dengan terganggunya dinasti klan Ampatuan yang menguasai seluruh wilayah Maguindanao dengan menempatkan anak dan sanak familinya di tiap daerah sebagai pejabat publik yang berpengaruh.

Sebelumnya, klan Ampatuan menjadi penyokong utama Gloria Macapagal Arroyo untuk pemilihan presiden pada tahun 2004, yang membuatnya memenangkan pemilu dengan memberikan semua suara masyarakat Manguindanao kepadanya (Mercado, 2010). Di sini, seluruh lembaga dan institusi di Maguindanao dalam genggamannya klan Ampatuan. Meskipun diakui, klan Mangudadatu sendiri bukanlah kelas politik klan baru. Ayahnya Ismail Toto Mangudadatu, Pua Mangudadatu adalah politisi terkenal sebagai presiden the Magnificent 7, kelompok politik yang sangat berpengaruh

di provinsi Maguindanao saat era rejim Marcos. Keberanian klan Mangudadatu untuk bersaing dengan klan Ampatuan merupakan usaha untuk mengembalikan kejayaan masa lalu mereka.

Bertolak dari sini, politik klan bukan hanya menjadi benalu, melainkan menjadi cacat wajah demokrasi di Filipina terkait dengan pengelolaan negara yang seharusnya untuk kebaikan masyarakat sipil seluruhnya. Kondisi ini mulai menggejala di Indonesia. Banyak dari partai politik mulai menerapkan sistem kekeluargaan dalam perekrutan kadernya dalam menentukan calon wakil rakyat maupun jabatan politik publik lainnya. Memang, Filipina dan Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang menerapkan dinasti politik keluarga dalam dunia politik. Jauh sebelum itu di negara-negara maju sudah menerapkan sistem dinasti politik keluarga. Namun, di tengah masih lemahnya regulasi dan standar dalam merekrut anggota keluarga yang berkompeten untuk menekuni bidang tertentu, situasi politik klan hanya akan menguntungkan keluarga dan kelompok dalam lingkaran mereka ketimbang untuk kebaikan publik. Ditambah lagi, fase transisi dari rejim otoriter hingga demokrasi yang masih sangat muda masih menemui banyak tantangan dan kendala.

Untuk Indonesia, jika situasi ini tetap dibiarkan, dengan terus memberikan kesempatan kepada sanak familinya untuk terjun dalam dunia politik, tanpa adanya upaya kerja keras menaikkan kualitas dan kompetensi mereka yang dapat berkhidmat untuk masyarakat, wajah demokrasi kita akan seperti Filipina, di mana kekerasan menjadi alat ampuh untuk menundukkan dinasti politik keluarga lainnya yang ingin merebut singgasana kekuasaannya, meskipun melalui arena pertarungan demokrasi yang legal, pemilu. Di sini, ruang kebebasan bersuara dan melakukan penuntutan hak sebagai bagian dari masyarakat sipil sekedar menjadi latarbelakang hiruk pikuk demokrasi. Di sisi lain, pengelolaan sumber daya alam dan juga hasil pajak yang seharusnya diperuntukkan untuk penguatan infrastruktur dan ekonomi masyarakat malah dijadikan lumbung kekayaan setiap anggota keluarga dalam dinasti politik yang mereka bangun. 🗨️

Perempuan Pendobrak dari Indonesia Timur

Sentralisasi pembangunan yang berada titik di Indonesia barat saja menjadikan pembangunan menjadi harga yang mahal bagi masyarakat di Indonesia timur. Ketidakhadiran pemerintah dalam ranah pendidikan, kesehatan dan juga pemberdayaan masyarakat menjadikan ketimpangan pembangunan di Indonesia. Hal inilah yang terekam dalam penglihatan saya ketika saya berkesempatan untuk mengeksklore Celebes Island beberapa waktu lalu.

Saya terlahir dari keluarga Islam, bersuku Jawa, tinggal di Jawa, dan beraliran Nahdlatul Ulama. Kombinasi tersebut benar-benar telah menjadi garansi bagi saya untuk berada di kelompok mayoritas. Sebagaimana kelompok mayoritas lainnya, saya juga merasakan kenyamanan dan terkadang privilege. Tentu bagi saya yang di comfort circle ini sulit membayangkan bagaimana masyarakat yang berada -diluar- circle yang saya diami sekarang.

Salah satu perjalanan saya yang sangat membekas adalah ketika saya mendarat di seorang kawan yang tinggal di Konawe Selatan-Sulawesi Tenggara (Sultra). Tempat yang saya tuju adalah di Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel). Kabupaten ini merupakan daerah pemekaran dan baru diresmikan pada tanggal 2 Mei 2004. Jarak dari kota Kendari ke Andolo ditempuh kurang lebih 3,5 jam dengan jalanan yang sempit dan bebukit-bukit. Jalanan yang masih belum beraspal dan berdebu, semak-semak tumbuh liar dan tidak ada sama sekali denyut aktivitas perkotaan seperti yang selama ini saya temui di Jawa.

Di tengah kemirisan hati melihat ketimpangan pembangunan yang sangat mencolok antara Indonesia Barat dan Timur, kegembiraan saya berangsur muncul ketika tiba di tempat kawan saya ini. Sebuah Masjid dengan bangunan permanen, deretan asrama tempat tinggal santri putra dan putri, serta beberapa kelas yang digunakan untuk sekolah Madrasah Ibtidaiyyah dan Madrasah Diniyyah. Inilah Yayasan Pondok Pesantren Minhajut Thullab.

Di daerah terpencil dengan penduduk yang mayoritas adalah transmigran dari Jawa sejak empat tahun lalu berdiri lembaga pendidikan. Tentunya lembaga ini bagaikan oase di

tengah peran pemerintah yang absen memberikan pendidikan kepada rakyatnya. Pengasuh dari Pesantren ini adalah Kyai Wildan dan Ibu Nyai Shoimah, keduanya berasal dari Banyuwangi.

Walaupun jumlah santri yang menetap masih sekitar 50 orang, namun implikasi dari keberadaan pesantren ini bak air bah yang menyapu di hampir seluruh daerah Andoolo. Ibu Nyai Shoimah (atau biasa dipanggil Umi Shoim) yang menamatkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah (SLTP) hingga Sekolah Tinggi di Pondok Pesantren Darussalam, Blokagung, Banyuwangi, Jawa Timur ini mulai melakukan gerakan pemberdayaan masyarakat di sekitar pesantren, terutama perempuan. Di tengah keterbatasannya, Umi Shoim rajin memberikan pengajian kepada masyarakat sekitar. Dalam pengajian tersebut banyak materi yang disampaikan. Dalam pengambilan tema pengajian, Umi Shoim sangat menekankan pentingnya pendidikan untuk anak-anak dan remaja. Selama ini pendidikan yang didapat anak-anak di Andoolo hanya dari sekolah seja, tidak ada penanaman moral dari pendidikan agama.

Di samping itu, selepas SLTA anak-anak di Andoolo biasanya langsung menikah atau bekerja, tidak ada yang melanjutkan pendidikan di universitas. Ekonomi dan jarak yang cukup jauh ke kampus yang berada di Kendari menjadi alasan, namun menurut Umi Shoim inti dari argumennya sebenarnya karena tidak adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Dengan dorongan yang terus menerus diberikan pada beberapa kesempatan, hasilnya, sudah dalam kurun dua tahun ini setiap tahun ada beberapa alumni dari Pondok Pesantren Minhajut Thullab yang melanjutkan sekolah tinggi di Jawa, terutama di Pondok Pesantren Darussalam, Blokagung, Banyuwangi, Jawa Timur. Umi Shoim selalu menekankan bahwa perubahan kehidupan daerah mereka untuk lebih baik bisa dilakukan bila putra daerahnya memiliki pendidikan yang baik.

Materi yang disampaikan dalam pengajian bukan hanya mengenai pendidikan, Umi Shoim juga memberikan pelatihan

Sentralisasi pembangunan di Indonesia barat menjadikan pembangunan menjadi harga yang mahal bagi masyarakat di Indonesia timur. Ketidakhadiran pemerintah dalam ranah pendidikan, kesehatan dan juga pemberdayaan masyarakat menjadikan ketimpangan pembangunan di Indonesia.



Nihayatul Wafiroh

Alumni University of Hawaii
at Manoa. Temporary Project
Officer CIDA-SILE/LLD Project
di UIN Alauddin, Makasar

tentang bagaimana menjadi pembawa acara dan berpidato. Dengan skill ini perempuan menjadi lebih percaya diri tampil di depan publik. Dengan hal sederhana ini, Umi Shoim telah mengangkat bargain position kaum perempuan di daerahnya.

Untuk memberikan pendidikan dasar yang baik Umi Shoim mendirikan Madrasah Ibtidaiyyah (Selevel Sekolah dasar) dan juga mengajar di Madrasah Tsanawiyah (SLTP) serta Madrasah Aliyah (SLTA) yang berada di Andoolo. Di institusi-institusi pendidikan tersebut Umi Shoim bukan hanya memposisikan diri sebagai pengajar yang hanya datang untuk menyampaikan materi pelajaran dan lantas pulang. Umi Shoim mendeliver ketrampilan-ketrampilan yang dimiliki kepada anak didiknya. Umi Shoim memperkenalkan tentang tari, pidato, baca puisi, master of ceremony, dan juga menulis. Bagi masyarakat yang jauh dari akses pendidikan ini ketrampilan menari yang terbi-lang sangat sederhana bisa menjadi kebanggaan tersendiri.

Ketika ada acara kunjungan dari Gubernur Sulawesi Tenggara, Umi Shoim yang harus mempersiapkan hampir semua acara, mulai dari MC, Pembaca Al-Quran, hingga acara hiburan, dan ini menjadi semacam motivasi kepada anak didiknya untuk terus mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Tanpa lelah Umi Shoim terus mendorong santri-santrinya untuk memiliki pengetahuan yang luas dengan memperkenalkan computer dan juga internet, "Walaupun listrik di sini sering kali pemadaman dan akses jaringan telfon juga kadang timbul tenggelam, saya sedikit-sedikit memperkenalkan internet ke anak didik saya, meskipun laptop dan modemnya cuman satu," ujar Umi Shoim.

Kegigihan Umi Shoim untuk mencerdaskan masyarakat dan anak didiknya mendorongnya untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk bisa mensupport mimpinya tersebut. Dan karena itu pulalah saya juga mendapatkan kesempatan untuk memberikan semangat kepada anak didiknya, dan juga berdiskusi dengan masyarakat sekitar tentang Kesehatan Reproduksi (Kespro). Dalam diskusi tentang Kespro, saya semakin memahami bagaimana masyarakat Andoolo ini masih jauh dari informasi memadai tentang kesehatan, alih-alih tentang akses kesehatan. Menurut masyarakat perempuan di desan Andoolo, bidan di wilayah tersebut tidak datang ke puskesmas setiap hari. Karena hal tersebut, masyarakat Andoolo sangat haus informasi mengenai kesehatan dan kesempatan yang dibangun oleh Umi Shoim ini telah membuka mata masyarakat perempuan Andoolo pada masalah kesehatan reproduksi.

Untuk kemandirian ekonomi pesantren dan meningkatkan kemampuan santri, Umi Shoim dan suaminya mengembangkan peternakan yang pengelolaannya melibatkan santri dan masyarakat sekitar. Dari kotoran ternak tersebut dikelola menjadi pupuk organik dan kemudian dijual untuk membiayai aktivitas pesantren. Untuk pengelolaan pupuk organik, Umi Shoim mendatangkan ahli pembuat pupuk organik untuk mengajarkan cara membuat pupuk kepada santri dan masyarakat sekitar. Hal ini tentu memberikan banyak benefit. Pertama, pesantren bisa terus mengembangkan diri dengan kemandirian dalam pembiayaan. Ini merupakan bibit dari independensi pesantren dalam perkembangannya ke depan. Kedua, pesantren mengajarkan ketrampilan kepada santri, dengan ini santri bisa memiliki keahlian ketika sudah keluar pesantren, dan nantinya hal tersebut bisa jadi modal untuk mengembangkan diri saat sudah keluar dari pesantren. Ketiga, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan peternakan dan pupuk organik membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan ketrampilan sekaligus pemasukan untuk ekonomi keluarga. Pelibatan masyarakat ini juga akan membangun hubungan harmonis antara pesantren dan masyarakat sekitar.

Sosok Umi Shoim di mata saya adalah pendobrak, dia meninggalkan zona nyamannya di Jawa dan memilih untuk berjuang di pedalaman Sultra. Dengan ijazah S2 yang dia miliki, tentunya Umi Shoim bisa saja menjadi dosen dengan penghidupan yang layak di Jawa, tapi nurani perjuangannya tidak puas hanya mendapatkan kebahagiaan untuk diri sendiri tanpa ada nilai berbagi dengan sesama. Umi Shoim tampil untuk mendobrak keabsenan pemerintah dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat.

Dari cerita Umi Shoim ini terlihat bahwasannya masyarakat tidak membutuhkan sosok pimpinan daerah yang hebat, mereka hanya perlu seorang yang mau terjun langsung kepada masyarakat, mendampingi dan memberikan pendidikan kepada masyarakat. Walaupun Umi Shoim bukan putra daerah setempat, tapi semangat yang tinggi untuk memajukan daerah terus mendorong Umi Shoim menyebarkan virus belajar kepada anak-anak agar tidak pernah berhenti belajar. Umi Shoim sadar betul bahwa pembangunan daerah Andoolo tidak akan bisa terjadi bila putra-putra daerah tidak melakukan dobrakan dalam pendidikan. Pengabdian inilah yang perlu dipelajari dan ditiru oleh semua pihak. 📌



Foto: Zainal/IRE

Papalele, Strategi Ekonomi Warga Ambon-Maluku

Karakteristik Provinsi Maluku Maluku sebagai provinsi kepulauan, tidak diragukan lagi memiliki potensi dan sumberdaya alam yang cukup melimpah, baik sumberdaya laut dan pesisir maupun sumberdaya kehutanan dan pertanian. Selain untuk konsumsi keluarga, Melimpahnya hasil laut ini juga dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber kehidupan ekonomi keluarga. Di Ambon dan daerah Maluku pada umumnya, usaha yang berbasis pada pedagang kecil ini lazim disebut papalele.

PAPALELE adalah pedagang kecil, umumnya kaum perempuan, yang berjualan di pasar atau dilakukan sambil berjalan dari gang ke gang untuk berjualan. Barang yang dijual adalah makanan

Oleh: Anton Kesaulya
Program Officer IRE-Mercy Corps
di Ambon

tradisional, ikan mentah, sayur, dll. Konon, papalele sudah ada sejak lama dan telah dikenal serta diterima oleh masyarakat. Tetapi asal-usul aktivitas papalele dalam perkembangannya, sebenarnya diduga mulai ada dan berkembang di kota Ambon dan Maluku sejak zaman VOC yang menekankan sistim hong. Sebuah model politik ekonomi untuk melumpuhkan sistim ekonomi masyarakat di kota Ambon pada khususnya. Hal ini terkait juga dengan model politik *'divide et impera'* yang

dibangun pemerintahan Belanda ketika itu (Souisa, 1999:39, Pattikayhatu, 2005:30-38).

Papalele memiliki ciri khas tersendiri; umumnya adalah para perempuan Ambon yang selalu mengenakan pakaian kebaya, menjunjung di atas kepala sejenis keranjang warna coklat berisi bahan yang akan akan dijual. Kegiatan usaha papalele ini selain dijajakan dari kampung ke kampung juga sering dijual atau didagangkan (tanding) di seputar pasar tradisional atau emperan toko namun sifatnya hanya insidental (sewaktu-waktu) bila ada sesuatu yang didapat dari usaha baik dari laut maupun hasil pertanian/perkebunan termasuk jajanan (kue dan makanan tradisional Ambon).



Foto: Zainal/IRE



Foto: amboncity.webs.com

Kekuatan Papalele ada pada jejaring dan kepercayaan yang terbangun antar mereka yang bersumber pada nilai kolaborasi, kepercayaan dan bukan kompetisi (sosial budaya), untuk mempertahankan rumah tangga dan usahanya. Dengan pola usaha ekonomi tradisional dan minim pemberdayaan namun mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Papalele sebagai usaha tradisional tetap menjadi pilihan keluarga -keluarga yang terpinggirkan dalam menopang ekonomi keluarga

Menghadapi persaingan ekonomi moderen yang turut mendesak para pelaku ekonomi di sektor mikro atau kecil yang berbasis keluarga terpinggirkan, sepat-

utnya pemerintah daerah perlu memaksimalkan peran usaha mikro seperti Papalele dengan melakukan pemberdayaan sehingga menjadi sesuatu kekuatan ekonomi mikro yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Agar kegiatan ekonomi berbasis keluarga semacam Papalele bisa terus berkembang, ada beberapa tantangan yang penting dicermati. Pertama, Papalele adalah usaha perorangan sementara usaha - usaha pembangunan & pemberdayaan ekonomi selama ini lebih ditekankan pada pengembangan kelompok masyarakat. Kedua, Papalele adalah aktifitas ekonomi yang bersifat musiman berdasarkan ketersediaan bahan yang akan diperdagang-

kan; papalele dapat berlangsung dalam waktu yang lama tetapi juga dapat berlangsung dalam waktu yang singkat (1 - 2 bulan). Ketiga, karena papalele bersifat musiman sehingga tempat berjualan tidak selalu pada tempat yang sama dan juga tergantung jenis bahan yang diperdagangkan. Ini dapat dilihat sebagai kegiatan yang mengganggu ketertiban kota karena kehadirannya di emperan toko, sepanjang jalan - jalan yang strategis pada waktu - waktu tertentu.

Melihat tantangan dalam membangun usaha "papalele" perempuan Ambon maka hal yang penting untuk dikembangkan adalah sebagai berikut: Pertama pemerintah kota perlu menginfentaris jumlah usaha papalele dan harus membedakan dengan pedagang kaki lima. Kedua, melakukan pemberdayaan melalui pelatihan - pelatihan dalam membangun usaha papalele. Ketiga, membangun jaringan permodalan melalui perkreditan dengan skema papalele melalui program - program pemerintah atau melalui lembaga - lembaga permodalan. Keempat, menyediakan ruang - ruang tertentu di perkotaan berdasarkan hasil pendataan bagi usaha papalele saat usaha papalele muncul pada musim tertentu. ■



Ya! Saya ingin berlangganan majalah **FLAMMA**

Nama/lembaga :

Alamat :

Kota : Kode Pos:.....

Telepon/fax :

Saya memilih untuk berlangganan majalah **FLAMMA** sebanyak (pilih salah satu):



1 edisi Rp. 9.500

4 edisi Rp. 32.000

6 edisi Rp. 45.000

8 edisi Rp. 56.000

(ditambah ongkos kirim, Jawa Rp. 6.000, Luar Jawa Rp 12.000)

Pembayaran:

Pembayaran dilakukan dengan transfer ke Rekening Bank: a/n Arie Sujito/Hesti Rinandari QQ IRE, Bank Mandiri Cabang YKT MM UGM, Yogyakarta. A/C No: 137-00-0549310-7

Silakan kirimkan bukti transfer tersebut kepada:

Hesti Rinandari, IRE Yogyakarta, Dusun Tegalrejo, Sariharjo, Ngaglik Sleman, Yogyakarta

Telp: 0274-867-686 Email: office@ireyogya.org

Website: www.ireyogya.org



Kunjungi website kami di
www.ireyogya.org

Beranda | Kontak Kami | **Indonesia** - English



Institute for Research and Empowerment

berpikir kritis, bertindak taktis untuk demokrasi

Tentang Kami | Program | Refleksi | Penelitian | Konsultasi | Perpustakaan | Buku Tamu

Reformasi

Program Besar

- Penanggulangan Kemiskinan di Desa
- CSR & CSO Propoor
- SAPA
- Mendorong Regulasi Desa
- National Influencing; Program Kemandirian Desa dan Penanggulangan Kemiskinan

kesatuan tata c...

Representasi Warga

g reformasi sistem
an yang berbasis pada
mengadakan seminar nasional
Perencanaan Pembangunan
emperkuat Representasi
akan dan Praktik Pelaksanaan
Santika Jakarta pada Kamis
uan umum bab I UU No.
hwa SPPN adalah satu

{ Baca Selengkapnya }

Quick Links

- ADD dan Kemiskinan Di ...
- Inisiatif Kemitraan Pe...
- Pengembangan Metodolog...
- Flamma 33 : Sengkarut ...
- KATALOG PERPUSTAKAAN
- Film PBB tentang Bojon...



Foto: 2.bp.blogspot.com

Dahsyatnya letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 merupakan fakta yang telah kita ketahui bersama. Semua orang dapat melihat buktinya melalui berbagai media yang berjuta jumlahnya. Tetapi realitas itu tentu dapat dipandang dari berbagai sudut yang kemudian dibingkai menjadi realitas buatan, realitas yang sedang dan ingin dibentuk manusia. Pasca erupsi, realitas buatan tentang letusan Merapi dari sudut pandang pemerintah nampak mendominasi di setiap wilayah dekat gunung Merapi. Tulisan ini merupakan pembacaan terhadap mitos baru mengenai Merapi yang dihadirkan pemerintah tersebut.

Salah satu cara memahami mitos yang sedang dibangun pemerintah terpampang lebar-lebar di berbagai sudut

wilayah terdekat Merapi. Sebuah spanduk besar dengan tulisan zona berbahaya Merapi terlihat di mana-mana. Jika terdapat spanduk itu, maka wilayah itu masuk sebagai zona merah. Dari sisi pemerintah, tanda tersebut bermakna bahwa wilayah itu harus steril dari hunian penduduk. Karena zona tersebut, kata pemerintah, rawan bencana Merapi. Hunian yang ada di tempat itu rawan terkena awan panas Merapi yang dapat meluluhlantahkan bangunan rumah warga.

Penetapan mana daerah yang rawan bencana dan mana yang tidak adalah berdasarkan keputusan BPPT (Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian). Menurut BPPT terdapat 31 dusun yang dikategorikan daerah rawan bencana erupsi Merapi. Peta

rawan bencana tersebut dibuat berdasarkan pengamatan dan penyelidikan terhadap erupsi Merapi pada tahun 2010 serta 100 tahun sebelumnya. Nah, kategorisasi inilah yang melegitimasi langkah pemerintah selanjutnya, yang diberi nama besar relokasi.

Gambar Merapi yang dipilih untuk ditempatkan di spanduk zona merah itu adalah saat gunung Merapi sedang meletus dengan lahar panas. Kemudian bertuliskan zona berbahaya Merapi dengan tanda merah. Dari pemilihan gambar tersebut tampak sebuah pendisiplinan ingatan pada betapa berbahayanya Merapi, pengingatan kembali pada letusan gunung Merapi yang telah merenggut nyawa serta sanak saudara orang-orang yang berada di wilayah tersebut, letusannya

telah menghilangkan segala benda serta orang yang mereka cintai.

Gambar itu menghilangkan realitas lainnya tentang Merapi yaitu realitas Merapi yang telah menyuburkan tanah sekitar sehingga dapat menyuburkan tanaman, yang biasanya digunakan masyarakat setempat untuk makan sehari-hari atau untuk pakan ternaknya. Realitas bahwa Merapi mengeluarkan banyak pasir, batu-batu, air bersih yang telah banyak digunakan penduduk maupun pengusaha. Realitas bahwa lahan di sekitar Merapi lebih subur, lebih sejuk dari daerah lainnya. Dan ini realitas lain yang dinafikan dari gambar tersebut, bahwa letusan besar Merapi 2010 bukan satu-satunya letusan yang pernah terjadi di gunung Merapi. Letusan-letusan lainnya, yang lebih kecil, yang tidak sampai membahayakan keselamatan warga sudah sering terjadi.

Realitas lain yang mengabaikan realitas dari sisi pengalaman penduduk adalah bahwa banyak daerah yang dimasukkan pada zona merah itu, ternyata rumah-rumah tersebut baik-baik saja saat erupsi 2010 terjadi. Dari pengamatan saya di desa Sidorejo, Pangukrejo, Umbulharjo, Cangkringan yang diletakkan sebagai daerah zona merah, beberapa rumah penduduk yang terbuat dari gedek maupun anyaman bambu yang terdekat dengan Merapi memang ada yang hancur. Tetapi rumah penduduk yang terbuat dari tembok, nampak berdiri kokoh dan baik-baik saja. Karena itu, penduduk dapat kembali lagi ke rumah tanpa melakukan renovasi yang berarti. Fakta itulah yang mengukuhkan keyakinan penduduk bahwa kategorisasi yang dibuat pemerintah menjadi semu atau pseudo-kategori.

Bagi penduduk, gambar itu semacam pengingat ketakutan terus menerus. Sebuah pengusiran dari tanah kelahiran mereka. Gambar itu semacam pengingkaran pada penduduk yang menyakini bahwa daerah mereka bukanlah daerah yang rawan bencana. Usaha pencabutan mereka dari tanah serta para tetangga yang selama ini telah menjadi tanah air mereka. Pemisahan penduduk setempat dari tanah kelahiran mereka, dari kehidupan sosial yang selama ini menghidupi dan dihidupi mereka semua.

Dengan demikian, kategori zona itu adalah instrumen untuk memudahkan pemerintah guna menguasai tanah-tanah serta "mengusir" penduduk yang ada di tempat itu untuk pindah dari tempatnya. Artinya, pembuatan kategori yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah dengan legitimasi dari para ilmuwan berdampak pada hilangnya pengalaman serta pengetahuan penduduk lokal.

Pengetahuan itu kemudian menjadi sebetuk mitos yang lebih sering mengintimidasi penduduk daripada menenangkan mereka. Seperti zona bahaya dengan tanda silang merah. Tanda ini seperti sebuah intimidasi halus, lewat kekerasan simbolik, terhadap penduduk karena diletakkan di tanah di mana penduduk sudah dan sedang nyaman menghuni rumah-rumah mereka.

Agar membuat realitas itu semakin nyata, sesuai dengan agenda pemerintah, pemerintahpun melakukan berbagai cara. Membujuk penduduk agar



mau meninggalkan tempat tersebut. Penduduk yang semula bersikukuh tidak mau diusir dari tanah kelahirannya, terus menerus dibujuk dengan menyakinkan bahwa daerah yang sekarang mereka tinggali adalah daerah rawan bencana Merapi, sehingga keyakinan mereka pun tergoyahkan. Bahkan, untuk merealisasikan mitos itu, pemerintah tak segan-segan menyuruh utusan-utusannya ke desa-desa dengan mengkampanyekan mitos itu pada penduduk sebagai satu-satunya kebenaran, yaitu sebuah mitos bahwa daerah mereka benar-benar rawan bencana Merapi. Daerah-daerah itupun dibuat kategorisasi menjadi tiga daerah rawan bencana Merapi I,II,III. Tak cukup di situ, sebuah organisasi besar yang diberi nama Rekompak telah didirikan untuk memuluskan proyek "relokasi".

Representasi Merapi sebagai "yang berbahaya" ini terus menerus diproduksi sehingga menjadi sesuatu yang seolah-olah nyata. Sebuah mitos, seperti mitos kecantikan, mitos nyai Roro kidul, yang menjelma menjadi kekuatan yang menggerakkan mereka yang mempercayainya, sekaligus melemahkan mereka yang memiliki kepercayaan yang berbeda. Sehingga bukan hanya penduduk yang mulai disingkirkan dari alam, tanah serta kehidupan sosial bu-

daya mereka selama ini yang menjadi tumpuan, menjadi tempat membagi kasih, bahkan telah menjaga alam Merapi untuk tidak dieksploitas secara besar-besaran oleh tangan-tangan besi manusia, tetapi juga kepercayaan orang-orang tentang Merapi mulai distandarkan.

Secara faktual, erupsi gunung Merapi tahun 2010 memang telah menelan korban nyawa dan harta. Akan tetapi, realita itu sekarang dipolitisir demi memenuhi imaji tentang sebuah taman nasional gunung Merapi (TNGM). Imaji TNGM dapat kita saksikan di beberapa tempat seperti di Kinahrejo, yang sekarang menjadi tempat taman wisata yang dikelola penduduk, di situ pemerintah menandatangani baliho bertuliskan kawasan ini masuk dalam TNGM. Tampaklah, kehendak pemerintah mengusir penduduk dari tanahnya, dengan memanfaatkan moment bencana erupsi Merapi 2010. Lalu, bagaimana dengan masa depan penduduk sekitar? Nampaknya tidak ada jawaban, selain beberapa bangunan-bangunan kecil yang lebih layak disebut sebagai kamar daripada rumah.

Fakta bahwa warga telah lama bergelut, bergantung hidup dari keberadaan Merapi serta telah menata mimpi di Merapi pelan-pelan mencoba dihilangkan dan digantikan dengan cerita akan keangkeran bencana Merapi. Sebuah bencana yang menjadi alat paling ampuh untuk mengatur warga yang seharusnya dilindungi serta dijamin hak-hak hidupnya oleh pemerintah.

Disinilah menjadi nyata tesis Foucault mengenai penyebaran kekuasaan yang bersembunyi di balik tembok besar yang bernama pengetahuan. Pengetahuan sepihak dari para ilmuwan yang tidak mengakomodir pengalaman penduduk tentu rawan menimbulkan bencana yang lebih besar dan menakutkan daripada erupsi Merapi. Bencana perselingkuhan antara pengetahuan dan kekuasaan menindas para penduduk. Sehingga di sini sebuah kuasa tampak sebagai sesuatu yang produktif. Penetapan zona berbahaya itu tak lain adalah untuk memuluskan proyek taman nasional gunung Merapi, yang tentu akan menghasilkan pengetahuan-pengetahuan tertentu tentang gunung Merapi, sekaligus menggerakkan apa yang disebut sebagai investasi dengan proyek besar yang diberi nama "relokasi" penduduk, yang sebenarnya pemilik sah tanah tersebut. ■

Nur Izzah Millati



Ilustrasi: Wiwid W

MERETAS REPRESENTASI SUBSTANTIF

Hari Suwandi, korban lumpur Lapindo, nekat jalan kaki dari Sidoarjo menuju Jakarta untuk menemui presiden. Nyaris sampai satu bulan lamanya lelaki berusia 44 tahun itu berjalan kaki, ia berangkat sejak tanggal 20 Juni 2012 dari Sidoarjo Jawa Timur, tiba di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2012. Sidoarjo-Jakarta bukan jarak yang dekat, bisa dibayangkan, sesampainya di Bogor perjalanan Hari Suwandi sudah menghabiskan delapan sandal. Hari Suwandi datang ke Jakarta hanya membawa satu pesan, ia hendak mengugah pemerintah untuk menyelesaikan masalah ganti rugi korban lumpur lapindo, yang hingga kini tak kunjung tuntas. Aksi Hari Suwandi memang sempat ditanggapi sinis oleh sejumlah orang. Bahkan dinilai sekedar cari sensasi. Beragam pernyataan warga ketika aksi Hari diungkap media massa.

Terlepas dari kontroversi sikap publik atas tindakan Hari Suwandi, ada hal penting yang perlu digaris bawahi. Setidaknya, fenomena itu merupakan cermin buntunya ruang aspirasi politik warga. Sehingga Hari Suwandi nekat jalan kaki

dari Sidoarjo menuju Jakarta untuk menemui presiden. Wakil rakyat yang sejatinya memiliki fungsi representasi politik warga kehilangan makna yang substantif. Kemudian Hari Suwandi nekat mengambil tindakan mengugah kepedulian Presiden. Apa yang dilakukan Hari sebenarnya tidak bisa sekedar dipandang aksi cari sensasi, melainkan sebetulnya aksi untuk mengugah. Teknik aksi mengundang empati, ketika akal sehat tidak lagi berfungsi.

Fenomena aksi Hari Suwandi terlalu sempit ketika hanya dipersepsikan cari sensasi. Dalam kerangka perspektif demokrasi, aksi Hari Suwandi perlu ditempatkan sebagai kenyataan mandulnya jalur regulasi representasi politik. Apalagi kalau dilihat dari konteks masalahnya, lumpur lapindo adalah kasus yang sudah berlangsung enam tahun lamanya, tapi hingga sekarang tidak juga terselesaikan. Hak ganti rugi yang seharusnya diterima korban masih menyisakan kekecewaan warga Sidoarjo. Dari kenyataan tersebut, semakin nampak adanya keberjarakan antara rakyat dan wakil rakyat. Kepentingan rakyat yang seharusnya menjadi

prioritas kerja wakil rakyat terabaikan. Sehingga rakyat seperti Hari Suwandi menempuh tindakan individual memperjuangkan kepentingan dan haknya.

Kenyataan semacam itu oleh Olle Tornquist (2009) disebut sebagai fenomena politik (*flawed representation*) representasi mengambang. Istilah *flawed representation* yang dikemukakan Olle Tornquist sebenarnya adalah kritik atas mengendurnya relasi politik antara rakyat dan wakil rakyat. Kenyataan itu muncul akibat adanya elitisme sebuah institusi atau lembaga publik. Sedangkan di level masyarakat, ditengah kepentingan keseharian semakin kompleks, terjadi fragmentasi partisipasi kepentingan yang menguat. Keberjarakan terus terproduksi semakin parah, wakil rakyat masa bodoh dan permisif, sedangkan masyarakat dibiarkan bertikai sendiri memperjuangkan kepentingannya masing-masing.

Padahal, secara normatif, wakil rakyat sudah memiliki landasan konstitusional yang tegas untuk melakukan serap aspirasi warga. Guna menjalankan fungsinya sebagai agen politik representasi.

Semisal, wakil rakyat wajib melakukan jaring asmara selama enam kali dalam setahun. Selain itu juga ada masa reses yang harus digunakan wakil rakyat untuk menyambangi konstituen di daerah pemilihannya. Bahkan juga diatur dalam undang-undang wakil rakyat harus membuat rumah aspirasi di daerah pemilihannya. Landasan konstitusional itu dimaksudkan untuk mendekatkan wakil rakyat dan rakyat sebagai pihak yang diwakili. Secara konsepsional di atas lembar konstitusi, upaya untuk mengarahkan representasi kearah yang substantif sudah cukup memadai.

Representasi substantif adalah representasi politik yang tidak sekedar deskriptif atau simbolik, dan formalistik, melainkan representasi yang benar-benar bertindak untuk (*acts for*) yang diwakilinya (*represented*) alias mewakili rakyat. Makna substantif disini menegaskan, bahwa representasi berdiri demi orang lain (*a way of standing for someone*) atau representasi sebagai cara bertindak demi orang lain (*a way of acting for someone*). Istilah representasi substantif ini banyak dikemukakan dan ditulis Olle Tornquist, seorang sosiolog dan peneliti Indonesianis dari Universitas Oslo.

Dalam konteks itu, menarik apa yang ditulis Slamet Luwihono (*Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif untuk Good Governance*, (ed.) : 2006), bahwa dalam sistem demokrasi politik perwakilan sangat diperlukan sebuah instrumen kelembagaan yang mampu mempertemukan antara pihak pemerintah, parlemen serta kalangan konstituen agar terus menerus terjadi komunikasi yang intens. Apa yang dimaksud dengan instrumen kelembagaan adalah media teknis untuk mewujudkan representasi substantif. Artinya, landasan konstitusional yang mengharuskan wakil rakyat membuat rumah aspirasi merupakan skema teknis untuk meretas representasi substantif.

Terkait rumah aspirasi memang sempat menuai kritik dari banyak pihak, tapi substansi kritik publik atas rumah aspirasi bukan pada konteks keberadaannya, melainkan pada wacana pembiayaan pembangunan rumah aspirasi yang direncanakan bersumber dari anggaran belanja negara. Sehingga publik mengutarakan protes. Akibatnya hingga sekarang keberadaan rumah aspirasi politik tidak benar-benar diperhatikan oleh para wakil rakyat. Keberadaan rumah aspirasi yang sejatinya urgen dikesampingkan. Padahal, jika dilihat dari kerangka prospektif demokrasi perwakilan, keberadaannya merupakan wujud ikhtiar politik guna mewujudkan konsep ideal representasi substantif. Skema teknis kelembagaan de-

mokrasi dalam bingkai politik representasi, menuju yang substantif.

Potret Rumah Aspirasi Budiman

Di tengah kenyataan representasi politik yang masih amburadul, Budiman Sudjatmiko, salah satu orang dari sekian banyak wakil rakyat mencoba meretas rumah aspirasi di daerah pemilihannya, Banyumas dan Cilacap Jawa Tengah. Ia membangun rumah aspirasinya secara individual sebagai wakil rakyat. Meski sebenarnya setiap daerah harus ada rumah aspirasi yang dibangun secara kolejal oleh seluruh anggota DPR lintas partai politik. Budiman Sujadmiko membangun sendiri, ketika anggota DPR yang lain dari daerah pemilihannya enggan dipersibuk membangun rumah aspirasi dan sibuk pula mencari anggaran untuk membiayai rumah aspirasi tersebut. Rumah Aspirasi Budiman (RAB) dibangun tidak lama setelah Budiman terpilih sebagai wakil rakyat periode 2009-2014.

Awalnya RAB memang sekedar bagian dari janji kampanye Budiman saat hendak mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Tapi keberadaannya sekarang tidak sesederhana itu, keberadaan RAB cukup efektif mendekatkan Budiman dengan warga Banyumas dan Cilacap. Membunuh jarak antara Budiman yang berada di Jakarta dan pemilihnya yang berada di Banyumas dan Cilacap Jawa Tengah. Keberadaan RAB seperti kehadiran Budiman itu sendiri di masyarakat. Karena RAB dikelola secara modern dengan struktur kepengurusan lengkap, yang setiap saat bisa menampung aspirasi dan keluhan warga Banyumas dan Cilacap.

Menurut Bornie Kurniawan dan M. Zainal Anwar (*Memotret Rumah Aspirasi Budiman; Dari Pusat Pemenangan Menjadi Agen Representasi: 2012*), RAB sejauh ini bisa dilihat dalam tiga hal, edukasi, advokasi, deliberasi. Secara edukasi, RAB senantiasa memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait fungsi anggota DPR (Budiman Sujadmiko). RAB juga senantiasa menginformasikan, bahwa apa yang dilakukan Budiman Sudjatmiko dalam upaya menyelesaikan kasus (khususnya soal tanah) yang dialami oleh warga. Sedangkan dari sisi advokasinya, selain melakukan pemberdayaan masyarakat, RAB juga melakukan pendampingan, terutama pada petani lahan konflik yang ada di Banyumas-Cilacap. Sudah cukup banyak konflik agraria antara petani dengan pemerintah yang sudah berhasil diselesaikan. Misalnya, di Cipari-Cilacap maupun di Cipendok-Banyumas (daerah di lereng gunung Slamet).

Adapun dari sisi deliberasinya, seringkali diselenggarakan forum khusus untuk pertemuan Budiman dan masyarakat yang diagendakan oleh pengurus RAB. Pertemuan antara Budiman dan masyarakat Banyumas dan Cilacap itu bisa dibagi dalam dua kategori, yakni masa reses dan non reses. Selain itu, Budiman juga bisa datang sesuai permohonan warga ketika ada masalah dan kebutuhan yang perlu dikeluhkan langsung kepada Budiman. Menariknya, setiap ada pertemuan antara Budiman dan masyarakat tidak ditemui adanya bentuk-bentuk proposal permohonan dana. Terkecuali catatan persoalan yang telah didiskusikan oleh warga dan diserahkan kepada Budiman. Keberadaan RAB cukup bermakna dalam upaya transformasi kesadaran politik warga. Masyarakat semakin terdidik secara politik.

Apa yang dilakukan Budiman Sudjatmiko, membangun rumah aspirasi secara individual patut kita apresiasi. Namun untuk dikatakan ideal tampak masih terlalu dini. Dalam politik, yang ideal adalah yang memiliki kualitas konsistensi atau keajekkan dalam kurun waktu yang lama. Karena waktu dengan sendirinya akan menguji idealitas sebuah sistem bangunan politik. Hal semacam itu juga pernah ditegaskan Budiman pada suatu kesempatan di Yogyakarta kepada penulis, bahwa ukuran kesuksesannya membangun RAB tidak bisa dilihat sekarang, butuh waktu, setidaknya barometer itu menurut Budiman adalah ketika dirinya kembali dipercaya atau menang dalam Pemilu legislatif mendatang.

Andai saja, semua wakil rakyat kita seperti Budiman Sudjatmiko, sepertinya tidak akan pernah terjadi fenomena Hari Suwandi. Karena apa yang dilakukan oleh Budiman Sudjatmiko, mendirikan rumah aspirasi, telah memotong jarak antara Budiman dan masyarakat pemilihnya. Ketiadaan jarak antara Budiman dan masyarakat pemilihnya menandai, bahwa apa yang dilakukan Budiman adalah ikhtiar awal untuk meretas representasi substantif. Representasi bertindak untuk (*acts for*) yang diwakilinya (*represented*). Merenungi fenomena Hari Suwandi dan mempelajari ikhtiar Budiman membangun rumah aspirasi, adalah langkah reflektif dan konseptual untuk mengawal tegaknya representasi substantif. ■

Father Rahman MD

(Disarikan dari laporan riset "Reformasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Memperkuat Representasi Warga" yang dilaksanakan IRE dengan dukungan Program Representasi-USAID)

DARI DESA KRISIS PANGAN MENJADI DESA MANDIRI PANGAN:

Pengalaman Desa Mbatakapidu Sumba Timur



Tidak mudah untuk keluar dari kondisi desa yang sejak tahun 1996 masuk dalam kategori desa krisis pangan, namun menginjak tahun 2011 mulai beranjak menjadi desa mandiri pangan. Begitulah pengalaman Desa Mbatakapidu, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Desa Mbatakapidu yang berada dalam wilayah kecamatan Kota Waingapu memiliki luas 28,2 km. Secara administratif desa ini terbagi ke dalam 5 dusun, 12 RW dan 24 RT. Penduduk desa ini berjumlah 1.668 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 61 jiwa/km yang terdiri dari 357 rumah tangga (KK) dengan rata-rata 5 jiwa per rumah tangga. Sebagai desa yang masuk dalam kategori krisis pangan, hampir sebagian besar penduduknya hidup dalam garis kemiskinan.

Sumber mata pencaharian utama warga adalah sektor pertanian. Komoditas pertanian yang dilakukan secara dominan adalah bertanam jagung. Ketika jagung yang ditanam gagal panen, praktis warga tidak memiliki sumber cadangan pangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selain hanya mengandalkan bantuan beras dari pemerintah. Begitulah siklus kehidupan warga yang seolah pasrah dengan nasib yang dialaminya.

Sampai suatu ketika, pada tahun 2009 terpilih seorang kepala desa yang baru, seorang pensiunan PNS yang pulang dan ingin mengabdikan di desanya, yakni Bapak

Jacob Tanda. Sebagai kepala desa yang baru terpilih, Bapak Jacob Tanda berupaya merangkul semua tokoh desa dan para mantan kepala desa untuk secara bersama-sama membangun desa. Proses awal yang dilakukan oleh Bapak Jacob adalah memulai dengan membangun kesadaran baru di kalangan warga, yakni kesadaran yang semula pasrah atas kondisi nasib miskin yang dialaminya untuk bangkit dengan kesadaran baru menjemput masa depan secara lebih baik. Bapak Jacob selalu mengkampanyekan semboyan, "lahir miskin wajar mati tetap miskin kurang wajar". Intinya semboyan ini mengajak warga untuk bangkit dan lebih bertanggung jawab sehingga tidak terus menerus mewarisi kemiskinan untuk anak cucunya.

Bapak Jacob mendorong warga dan organisasi warga bersama pemerintahan desa membuat perencanaan desa yang memiliki fokus utama mengatasi krisis pangan. Dari proses diskusi merumuskan perencanaan desa, pemerintahan desa memutuskan strategi bercocok tanam yang selalu mengandalkan jagung dengan strategi bercocok tanam multikomoditas sehingga jika tanaman yang satu gagal masih ada harapan pada jenis tanaman lainnya.

Strategi ini kemudian dipadukan dengan 3 kebijakan desa untuk semua warganya. Pertama, gerakan menanam komoditas tanaman jangka pendek, seperti jagung, ubi, padi, sayur-sayuran dan kacang-kacangan. Setiap rumah tangga di dalam pekarangan dan areal kebunnya harus menanam paling kurang 5 sampai



dengan 10 jenis tanaman umur jangka pendek. Kedua, menanam komoditas tanaman jangka menengah. Setiap rumah tangga di areal pekarangan rumah dan kebunnya wajib untuk menanam setidaknya 5 sampai dengan 10 jenis aneka ragam tanaman jangka menengah, seperti pohon kelapa, pisang, sukun, sirsak, pepaya, kemiri, jambu mete, nangka, mangga dan lainnya. Ketiga, menanam komoditas tanaman jangka panjang. Setiap rumah tangga diharuskan menanam minimal sebanyak 1.000 pohon tanaman umur panjang. Diantara jenis pohonnya adalah tanaman pohon mahoni, jati lokal, dan gamalina.

Agar ketiga komoditas ini benar-benar ditanam oleh warga disetiap halaman atau pekarangan rumah dan kebunnya, pemerintah desa membuat kartu kontrol. Kartu kontrol ini memuat isian semua jenis pohon dan jumlah yang ditanam, juga berapa yang gagal dan terus tumbuh. Kartu kontrol ini dibuat rangkap 3, masing-masing 1 untuk desa, 1 untuk ditempel di depan rumah dan 1 lagi untuk pegangan yang dapat dibawa kemana-mana oleh kelapa rumah tangga.



Foto: blog.umy.ac.id

Kerjasama Multistakeholders

Untuk memperoleh bibit dan anakan pohon dari ketiga jenis komoditas tanaman diatas, pemerintah desa melakukan 3 pendekatan. Pertama, membangun swadaya warga untuk mengumpulkan bibit dan anakan pohon. Kedua, dengan membeli bibit dan anakan pohon dari alokasi dana desa (ADD) Ketiga, dengan membangun jaringan dengan pemerintah daerah, khususnya dinas pertanian dan kehutanan. Misalnya, pada tahun 2010, berhasil memperoleh bantuan bibit anakan pohon kelapa sebanyak 7.500 bibit. Juga pengadaan anakan sukun sebanyak 1.000 pohon. Tahun 2011 kembali memperoleh bantuan sebanyak 1.750 bibit pohon kelapa.

Pemerintah desa juga bekerjasama dengan berbagai lembaga donor untuk menyukseskan program desa mandiri pangan agar dapat berhasil, baik itu yang bersifat infrastruktur, permodalan usaha dan pengembangan kapasitas warga. Diantaranya adalah GTZ-Jerman pernah memberi bantuan pembangunan infrastruktur sarana irigasi agar sumber mata air di desa Mbatapidu dapat mengalir

ke sawah-sawah warga. Program ini kemudian dilanjutkan pengembangannya oleh Dinas PU Sumba Timur.

VECO dan juga ACCESS di dalam program pengembangan kapasitas warga, baik dalam konteks penguatan produksi pertanian dan pemasaran produk-produk pertanian. PNPM-Md dan Dinas Pertanian juga bergerak pada simpan pinjam yang sangat membantu pula untuk pemenuhan modal warga yang tergabung di Gapoktan. Terdapat 24 kelompok tani yang tergabung di Gapoktan. Setiap kelompok tani memiliki keanggotaan sebanyak 10 - 25 anggota, sehingga jumlah keseluruhan anggota Gapoktan yang terdapat di Desa Mbatapidu mencapai lebih kurang 466 orang.

Hasil dan Petikan Mutiara

Kini setelah dua tahun menanam, pada akhir tahun 2011, Desa Mbatapidu sudah mulai memetik hasilnya. Suplai sayuran dan beberapa jenis buah-buahan di pasar kota Waingapu berasal produksinya dari Desa Mbatapidu. Tiga komoditas tanaman jangka pendek, menengah dan panjang sudah terlihat mampu

memenuhi harapan masa depan warga lebih baik lagi.

Yang tidak kalah menariknya, proses dan dinamika membangun desa mandiri pangan ini adalah peran yang dilakukan oleh kaum perempuan. Sebagaimana prestasi yang mulai ditoreh Kelompok Wanita Tani (KWT) Tapa Walla Badi di Kambata dalam meningkatkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat, yakni keberhasilannya menembus 16 nominasi peraih Kehati Award ke 7 dari 100 peserta perseorangan/kelompok. Penghargaan Kehati ini adalah untuk kategori ketahanan pangan pada perseorangan atau kelompok yang berjuang keras untuk mengusahakan ketahanan pangan dengan mengandalkan berbagai jenis pangan lokal.

Presetasi lainnya dari KWT Tapa Walla Badi yang dimotori oleh Marlina Rambu Meha dan Konda Ngguna kini mengelola lahan kering di Jawa Wula (4.200 meter persegi) dan Wailingga (1,5 hektar) dengan aneka jenis tanaman lokal seperti jagung, kacang-kacangan, sorgum, jawawut, umbi-umbian dan pisang. Dengan bimbingan BP3K, KWT ini juga berhasil melakukan uji coba singkong mukibat-hasil persilangan antara jenis lokal dan singkong karet. Dari satu pohon singkong mukibat menghasilkan sekitar 22 kg umbi segar. Sementara singkong lokal hasilnya hanya 2 kg per pohon. (Kompas, 16/3/12).

Dari paparan ini, beberapa mutiara yang bisa dipetik dari dinamika desa, antara pemerintah desa dan organisasi warga ini adalah (1) pembangunan yang dibimbing oleh nilai, komitmen yang berbasis pada kekuatan warga akan menghasilkan perubahan yang memiliki akar yang kuat untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan (2) kepemimpinan yang baik yang mampu mengerahkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) mampu mengerahkan modal sosial dan aset yang ada di lingkungan desa di dalam mengatasi krisis pangan (4) desa memiliki kemampuan di dalam membangun sebab itu sangat dibutuhkan adanya kewenangan yang diperlukan. (5) pembangunan yang ingratif, baik dari sisi perencanaan dan pelaksanaan sangat penting, khususnya antara pemerintahan desa dengan pemerintah daerah sampai pusat dan lembaga-lembaga sosial lainnya agar fokus pada permasalahan utama.

Abdur Rozaki

Peneliti IRE Yogyakarta

Tulisan ini berdasarkan hasil Field Study yang didukung ACCESS-IRE Yogyakarta.

Menguak Strategi Bantuan Pembangunan di Indonesia

Setelah reformasi berlangsung, wajah Indonesia berubah. Secara ekonomi, Indonesia sudah masuk kelompok berpenghasilan negara menengah. Secara politik, termasuk dalam kategori negara terbesar yang menjalankan sistem demokrasi setelah Amerika dan India. Kenyataan itu patut kita terima dan kita akui adanya. Tapi perlu diakui pula, kabar gembira itu tak sepenuhnya menyenangkan. Indonesia masih diselimuti problem fundamental di level masyarakat misalnya kemiskinan, pengangguran hingga korupsi terhadap dana anggaran publik. Setidaknya demikian hasil analisis banyak lembaga bantuan pembangunan selama satu dekade terhadap Indonesia.

Setelah peristiwa reformasi politik tahun 1998 di Indonesia, terjadi perubahan pada haluan dan aliran dana pembangunan dari luar negeri dan dalam negeri. Baik yang berupa hibah atau pinjaman, lebih banyak mengalir seirama dengan program pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Artinya, dana pembangunan dari luar negeri atau dalam negeri terpola pada orientasi penguatan kelembagaan negara. Dengan begitu, aliran dana untuk lembaga sipil mengecil. Pola orientasi dana pembangunan yang lebih mendukung penguatan kelembagaan negara, disisi lain justru bermakna peminggiran terhadap penguatan peranan kelompok masyarakat sipil.

Konten kritis itulah yang cukup menarik dari buku ini. Buku ini menyumbangkan analisis tajam dengan perspektif demokrasi terhadap aliran dana bantuan pembangunan. Buku ini menguak sisi problematis pada orientasi dana pembangunan selama satu dekade. Di satu sisi demokratisasi didengungkan sebagai perjuangan mendesak. Namun, di sisi lain penguatan kelompok masyarakat sipil justru terabaikan. Ada kekeliruan orientasi bantuan dana pembangunan di Indonesia. Dana bantuan berorientasi pada tata kelola pemerintahan justru menjadi bias demokrasi. Hal ini karena peran masyarakat sipil dalam mendorong demokratisasi cenderung terpinggirkan.

Buku ini sangat penting, apalagi ketika dikaitkan dengan kenyataan birokrasi pemerintahan kita yang banyak didiami



oleh para pejabat bermental koruptif. Reformasi politik tahun 1998 tidak serta-merta menghasilkan reformasi di tubuh birokrasi. Sedangkan reformasi politik representasi melalui skema Pemilihan Langsung (Pemilu) tidak juga melahirkan para wakil rakyat yang benar-benar memihak rakyat. Peranan kelompok masyarakat sipil menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan dan mendorong penguatan sistem demokrasi yang bermakna. Demokrasi yang mampu melahirkan kesejahteraan dan menumpas kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

Sebagaimana ditegaskan dalam pendahuluan buku, kelompok-kelompok masyarakat sipil Indonesia pasca-reformasi bak layang-layang yang diputus talinya, limbung dan hampir tanpa arah, baik secara pendanaan maupun orientasi gerakannya. Tradisi berhadapan dengan rezim otoriter nyaris tidak dibutuhkan lagi. Partai-partai politik dan lembaga perwakilan kini mulai berfungsi dan memiliki pengaruh penting dalam penentuan kebijakan pembangunan. Di era ini pula, bermunculan pendapat yang mempertanyakan relevansi kelompok-kelompok masyarakat sipil. (hal. 4). Ketika partai politik

dan lembaga perwakilan lebih banyak menentukan kebijakan pembangunan, adalah mimpi buruk bagi masyarakat kita, karena kita tahu partai politik dan warga senayan lekat dengan perilaku-prilaku koruptif.

Buku ini sungguh cukup menarik, kritik yang dibangun sangat konstruktif dan evaluatif. Keberadaan kelompok masyarakat sipil di Indonesia tidak luput dari kritiknya. Kemandegan peran kelompok masyarakat sipil tidak melulu dilihat karena faktor menipisnya aliran dana dari pihak luar. Kelompok masyarakat sipil dikatakan limbung karena pola gerakannya tidak juga segera bergeser dari pola lama yang konfrontatif. Padahal, situasi politik di Indonesia sudah meniscayakan lahirnya pola gerakan masyarakat sipil yang konstruktif. Negara tidak penting lagi dilihat sebagai musuh bersama, melainkan perlu diposisikan sebagai lokomotif perubahan untuk didorong. Pola kemitraan adalah pilihan yang tepat untuk dikembangkan.

Di lain sisi, kritik buku ini terhadap kelompok sipil adalah, terjadinya fragmentasi antar kelompok sipil, tidak terbangun pola sinergi atau kerjasama dalam mendorong pembangunan. Sedangkan pada sisi kelembagaan, kelompok sipil masih cenderung tradisional, masih mengandalkan pola "pemimpin-pengikut". Kenyataan itu mengakibatkan tersumbatnya pola regenerasi kepemimpinan yang progresif.

Gagasan terpenting buku ini adalah merekomendasikan pentingnya pergeseran strategi bantuan pembangunan. Kalau selama satu dekade bantuan pembangunan lebih deras mengalir ke tata kelola kelembagaan, ke depan penting digeser ke arah penguatan peranan kelompok masyarakat sipil. Pola bantuan pembangunan berbasis demokrasi, begitu istilah dalam buku ini. Asumsi dasarnya, kebangkitan kelompok-kelompok masyarakat sipil memungkinkan lahirnya energi positif dari berbagai aktor dan sektor sehingga dapat memberikan kontribusi bagi upaya menciptakan pemerintahan yang berkualitas dan masyarakat yang demokratis, berbasis hukum dan menghargai hak-hak asasi manusia. 📌

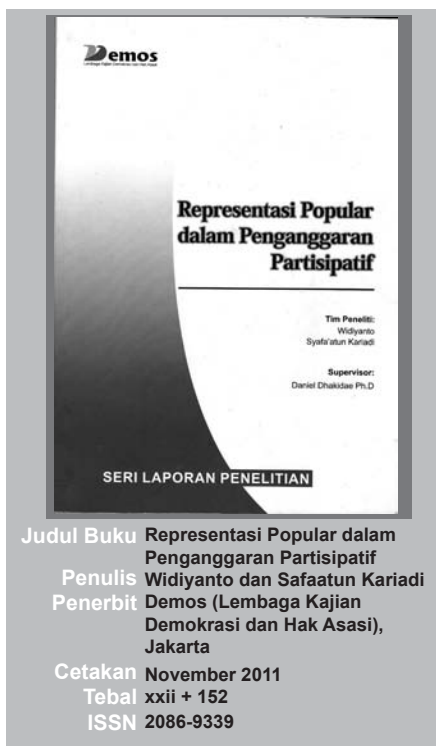
Fathor Rahman, MD

Skema Penganggaran Partisipatif

Keberhasilan desa atau pemerintahan desa tidak akan menjadi cerita menarik dan menjadi contoh bagi desa-desa lain, apabila proses pembangunan desa hanya melibatkan sejumlah elit lokal. Tanpa adanya akuntabilitas, transparansi, dan pelibatan warga secara partisipatif, kemanfaatan hanya bisa dinikmati oleh segelintir elit lokal dan abai terhadap eksistensi warga. Terkait keterlibatan warga dalam proses pengambilan kebijakan, menarik untuk menengok apa yang telah terjadi di Kota Banda Aceh, Kabupaten Serang, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Poso.

Dengan studi kasus di empat kota, buku ini menceritakan bagaimana kota-kota tersebut memberikan peluang demokrasi di tingkat lokal. Peluang participatory planning tersebut dijawab dengan penganggaran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan penganggaran keuangan desa. Seperti dikatakan Daniel Dhakidae dalam buku ini bahwa demokrasi di tingkat lokal dapat dimanifestasi dalam ruang pengelolaan sumber keuangan desa (participatory budgetting) yang selama ini kadang bermasalah. Dalam konsep demokrasi lokal, participatory budgetting memberikan peluang bagi masyarakat desa (pemerintahan desa) untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa.

Penganggaran partisipatif dimaksudkan sebagai tahapan demokratisasi yang mengarah pada perumusan anggaran, perencanaan, penggalangan, perembuan, dan pengambilan keputusan dalam proses pembangunan desa. Di beberapa daerah, perumusan dan perencanaan keuangannya acap ditentukan oleh segelintir elit saja, sementara masyarakat menerima hasil jadinya. Disinilah tidak adanya akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan. Tidak dapat dipungkiri adanya konflik di tengah-tengah masyarakat dapat dipicu dari serangkaian kecemburuan sosial dengan tidak adanya akuntabilitas keuangan.



Judul Buku Representasi Populer dalam Penganggaran Partisipatif
Penulis Widiyanto dan Safaatun Kariadi
Penerbit Demos (Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi), Jakarta
Cetakan November 2011
Tebal xxii + 152
ISSN 2086-9339

Keunikan lain dalam buku ini misalnya terkait pelaksanaan Musrenbang. Di Kabupaten Poso pelaksanaan Musrenbang dilakukan secara partisipatif dari bawah. Adanya konflik 1999-2002 yang pernah terjadi di daerah yang mempunyai slogan "Sintuwu Maroso" ini tidak membuat masyarakatnya trauma. Justru konflik tersebut dijadikan momentum untuk menyatukan kembali masyarakat dalam kebhinekaan sintuwu maroso. Sesuai dengan pasal 23 ayat (2) UU No 25 tahun 2004 tentang SPPN menegaskan bahwa batas waktu Musrenbang untuk penyusunan RKPD selama kurang lebih sebulan. Akan tetapi kebanyakan desa di kabupaten Poso melaksanakan Musrenbang tingkat desa lebih cepat dari waktu yang ditentukan dalam aturan, yakni hanya satu hari. Hal menarik lainnya karena pemerintah desa menamai perte-

muan perencanaan pembangunan bukan Musrenbang, tapi musyawarah pembangunan atau disingkat Musbang.

Sedangkan metode peserta Musrenbangdes untuk menentukan skala prioritas tampak sederhana namun terukur. Peran kepala desa dalam proses Musrenbangdes sangat terbatas yakni sebagai fasilitator dan tidak berposisi sebagai pemberi persetujuan usulan. Kepala desa membantu menentukan dan menyusun usulan warga secara sistematis berdasarkan prioritas pelaksanaan program. Tiap usulan Musbang desa di Poso rata-rata dibuat tabel isian berdasarkan lokasi, volume, estimasi biaya, sumber pendanaan dan sasaran manfaat. Metode penyusunan usulan yang didasarkan pada need-based ini diperoleh warga desa dari para aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terlibat dalam program penguatan peran kepala desa dan BPD. (hlm. 48-54)

Penganggaran partisipasi tentunya tidak akan berjalan optimal bila tidak didukung sepenuhnya oleh pemerintah setempat. Proses pemerintahan seyogianya dapat dibuat seoptimal mungkin demi menghadirkan pelayanan yang transparan bagi warga. Sehingga tidak adanya kecurigaan antara warga dan pemerintah menjadikan pelaksanaan penganggaran melalui Musrenbang berjalan dengan baik. Bila terdapat 'kesenyapan' antara salah satu pihak tersebut pada muaranya dapat melahirkan konflik. Misalnya adanya dinamika politik tidak sehat dapat menjadikan pos penganggaran sebagai medan konflik terbuka (para elit). Untuk itu, partisipasi masyarakat dalam penganggaran tidak hanya melalui tahapan inovasi pelaksanaan. Lebih dari itu ialah, bagaimana pemerintah memberikan pelayanan yang baik terhadap warga melalui pemberdayaan yang berkesinambungan. 📌

Mohamad Fathollah

Jacob Tanda

Kepala Desa Mbatakapidu-Sumba Timur



“Lahir Miskin Wajar, Mati Tetap Miskin Kurang Wajar.”

Foto: Abdur Rozaki/IRE

Salah satu cerita sukses pembangunan desa tidak lepas dari kepemimpinan pemerintahan desa. Dalam hal ini kepala desa tentunya mempunyai peran signifikan dalam proses perencanaan dan pembangunan desa. Adalah Jacob Tanda, B.A, kepala desa yang memberikan kemanfaatan bagi warga desa. Dengan gaya kepemimpinannya, Jacob dan warga desa mendorong kerja pembangunan desa partisipatif.

Jacob Tanda tidak hanya membangun desa melalui visi dan misi menuju kesejahteraan dan kemandirian rakyat. Terdapat hal yang menarik dari semangat kepemimpinan Jacob. Lihat saja misalnya tulisan di atas pintu masuk kantor desa. Terdapat semboyan “Lahir Miskin Wajar, Mati Tetap Miskin Kurang Wajar.” Setelah ditelisik lebih jauh prihal makna tersirat dari semboyan tersebut dikarenakan Jacob sadar bahwa harus ada gerakan riil demi merubah hidup warga desa agar lebih baik. Dari semboyan tersebut ia mengatakan “Untuk memutus siklus hidup para orang tua yang mewariskan kemiskinan bagi anak-anaknya,” katanya.

Dari kepemimpinannya, organisasi kemasyarakatan desa bergerak aktif. Selain itu, Yakob mendorong maksimalisasi potensi ekonomi desa melalui kemitraan dan melakukan penataan (revitalisasi) kelembagaan adat sebagai bagian pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Dalam hal ini Jacob menggabungkan potensi lokal dan awig-awig kebudayaan adat sebagai modal utama menuju kesejahteraan rakyat.

Jacob Tanda adalah generasi kepala desa keempat sejak desa ini berdiri pada 20 Juli 1963. Sebelum menjabat kepala desa pada 2009, Jacob merupakan PNS. Sebagai anak kandung desa Mbatakapidu, Jacob merasa ikut bertanggung jawab dalam mengawal pembangunan desa. Melalui kepemimpinannya ia pancingkan visi dan misi sebagaimana berikut ini, yakni Visi; Menuju Masyarakat Desa Mbatakapidu Yang Adil, Makmur dan Sejahtera. Dengan Misi, (1) Terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil, yakni masyarakat yang seimbang dalam hak dan kewajiban tidak diskriminatif dan dalam suasana kebersamaan yang

harmonis. (2) Terwujudnya masyarakat yang makmur, yakni terpenuhinya kebutuhan dasar yaitu: pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan. (3) Terwujudnya masyarakat yang sejahtera, yakni masyarakat yang hidup aman, tentram, lahiriah dan bathiniah tidak berkekurangan terancam dari ancaman dan gangguan.

Desa Mbatakapidu sendiri berada di kawasan bebukitan kapur Sumba Timur. Kehidupan pertanian di desa tersebut mengandalkan holtikultura ubi-ubian. Walaupun berdekatan dengan mata air Mbatakapidu tidak dapat dikatakan desa tersebut sepenuhnya subur. Karena itu Jacob Tanda sebagai kepala pemerintahan desa memaksimalkan potensi yang ada dengan memanfaatkan kelompok tani yang berjumlah kira-kira 27 kelompok di desanya. Tidak hanya itu kini Jacob mulai melebarkan sayap dengan melakukan kerja sama dengan berbagai instansi dan LSM melalui kerja sama satu arah, yakni saling menguntungkan. 📌

Mohamad Fathollah



Foto: Titok Heriyanto/IRE

Langkomu, desa bagian dari kecamatan Mawangsa-Buton, memiliki perempuan yang tangguh dan berani demi menjaga kelestarian alam. Dia Saida, seorang ibu beranak mepat yang berumur 44 tahun. Keberadaannya ditakuti oleh para pengebom ikan, karena keberaniannya melaporkan seorang pengebom ke kantor polisi setelah orang tersebut semena-mena mengebom keramba budi daya rumput laut miliknya.

Memasuki wilayah desa Langkomu seperti halnya masuk pada kawasan desa-desa di Kabupaten Buton. Kanan-kiri jalan yang ditumbuhi belukar serta rumah-rumah yang jarang dan lokasi desa yang saling berjauhan. Kondisi tanah di Langkomu tandus dan berbatu, membuat para petani hanya bisa menanam jagung dan ubi. Sehingga hampir semua petani juga menjadi nelayan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Mereka menggantungkan hidupnya di laut, dengan membudidayakan rumput laut, menangkap ikan dan menjual kepiting. Namun, penghasilan dari laut itu hanya cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Sehingga, wajar jika penduduk memilih cara instant un-

tuk menangkap ikan agar hasil tangkapannya banyak dan tidak membutuhkan waktu lama. Beberapa penduduk menggunakan bom ikan, dan racun sianida untuk melancarkan aksinya.

Saida, seorang perempuan tak lulus SMP telah mampu membuat para pengebom ikan jera. Ketika terdengar ledakan bom, segera dia mengambil sampian dan mendayung dengan sekuat tenaga hingga sampai pada sumber ledakan. "disana, saya berdialog dengan pengebom, saya memperingatkan bahwa mengebom itu adalah merusak. Ketika dia tidak mau menghentikan tindakannya, saya benar-benar melaporkan orang tersebut ke polisi", ujarnya.

Sikap Saida yang berani memperingatkan pengebom, ternyata tidak disenangi oleh beberapa penduduk. Dia didatangi beramai-ramai dan rumahnya diancam akan dibakar jika Saida tetap bersikap seperti itu. Kepala dusun-pun menghimbau Saida untuk tidak melaporkan para pengebom ke Polisi. Namun, dia tetap bersikeras untuk tetap melawan para pengebom ikan dan mempersilakan para penduduk untuk membakar rumahnya. "Saya tidak menanggapi kemarahan me-

reka dengan ikut marah, saya ajak suami dan empat anak saya keluar rumah dan saya persilakan penduduk untuk membakar rumah saya. Saya masih percaya hukum di negeri ini", ungkapnya.

Sikapnya yang tenang dalam menghadapi pengebom serta tidak terbawa kemarahan mereka menjadikan usaha Saida tidak sia-sia. Dia terus melakukan teguran kepada siapa saja yang sengaja merusak laut. Mengajak seluruh warga untuk sadar dan peduli terhadap sumber daya alam. Setelah kerja kerasnya yang panjang, ternyata saat ini hasil tangkapan kepiting mereka lebih besar dari hasil tangkapan sebelumnya. Saida berhasil berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi dan mempengaruhi kebijakan desa. Pemerintah desa memberikan apresiasi terhadap kegigihannya dengan membuat Perdes pengelolaan sumberdaya lokal. Serta, keberaniannya yang mengagumkan dalam menjaga kelestarian laut itu membuatnya dianugerahi sebagai "Inspiring Women" oleh salah satu tabloid wanita. 📌

Melani Jayanti

Bantuan

Dalam situasi apapun dan dimanapun, yang namanya bantuan selalu diharapkan. Orang memberi bantuan juga memiliki segudang motivasi. Seorang politisi memberi bantuan agar dikenang warga dan kelak dipilih kembali dalam pemilu. Pemerintah memberi bantuan, konon untuk memancing dana swadaya dari warga sekaligus menjadi pencitraan yang baik. Sementara seorang agamawan memberi bantuan untuk mencari pahala. Seorang pengusaha mengucurkan bantuan agar perusahaannya dikenang dengan baik dan tidak dituding sebagai biang kerusakan. Pada saat lembaga internasional mengatakan akan memberi bantuan kepada Indonesia, banyak rakyat tertipu karena uang yang diberikan sebetulnya adalah hutang. Karena itu, tidak perlu heran jika hutang Indonesia terus menumpuk. Itulah ragam makhluk bernama bantuan.

Pada awalnya, bantuan adalah sesuatu yang diberikan kepada orang yang membutuhkan agar yang bersangkutan bisa survive atau terus hidup. Tetapi, lama kelamaan, bantuan ibarat candu yang selalu dinanti. Dalam sebuah kesempatan, saya pernah melakukan wawancara dengan seorang Kepala Desa di Gunungkidul-Yogyakarta. Dengan tegas Kades tersebut mengatakan bahwa berbagai model bantuan yang diberikan pemerintah seperti bantuan langsung tunai (BLT) sebagaimana dilakukan di masa lalu, sejatinya hanya membuat warga ingin dicap miskin. Di sisi lain, sebagai seorang kades dirinya juga sering menjadi sasaran warga yang tidak puas terutama karena menganggap dirinya miskin dan layak mendapat BLT. Padahal, kata kades tersebut, "saya hanya menyalurkan BLT sesuai data dari atas."

Pernyataan tersebut mungkin dirasakan banyak kepala desa di Indonesia. Kritik terhadap BLT maupun skema bantuan lainnya kerap disuarakan banyak pihak. Pernyataan di atas menjadi penting untuk menegaskan bahwa konsep bantuan, kecuali dalam tahap darurat bencana, semestinya tidak dijalankan oleh pemerintah terutama untuk skema maupun strategi penanggulangan kemiskinan. Jika dirunut, sejak lama Pemerintah Pusat

selalu memakai konsep bantuan dalam pengambilan kebijakan terutama terhadap desa. Selain itu, kementerian maupun lembaga yang ada di Jakarta juga seringkali menjadikan desa sebagai hilir bantuan karena dianggap "gudang" kemiskinan. Hal ini juga seringkali diikuti oleh dinas di pemerintah kabupaten yang seringkali menggelontorkan bantuan ke desa misalnya memberi bantuan benih, bantuan tanaman obat untuk keluarga dan sebagainya.

Sayangnya, sudah terlalu sering bahkan, model bantuan yang dilakukan tidak pernah diikuti dengan skema pengawasan. Contoh sederhanya tentang bantuan tanaman obat untuk keluarga, lazim disebut TOGA, di daerah Banyumas-Jawa Tengah. Saat saya bertanya kepada salah seorang warga terkait pohon yang ada di belakang rumahnya, warga tersebut menjawab bahwa ia mendapat benih pohon tersebut dari perangkat desa. Kata perangkat desa, lanjut warga tadi, pohon tersebut merupakan tanaman obat yang didrop ke balai desa oleh sebuah dinas. Sayangnya, kata warga tadi, dia sendiri tidak tahu, apa khasiat pohon tersebut dan bagaimana menggunakannya. Wal hasil, pohon yang ada menjadi kurang bermanfaat.

Apakah skema bantuan ini salah? Tentu tidak demikian. Saya teringat lagi

*Sayangnya,
sudah terlalu
sering bahkan,
model bantuan
yang dilakukan
tidak pernah
diikuti dengan
skema penga-
wasan.*

dengan pernyataan Kades di Gunungkidul. Menurutnya, sudah menjadi tipikal seorang kades untuk pantang menolak bantuan dari Pusat. "Sekali anda menolak bantuan, maka selamanya anda tidak pernah mendapat bantuan lagi," demikian kira-kira pernyataan tersebut. Artinya, bantuan apapun yang diberikan ke desa, maka seorang kades akan berpikir keras untuk menjalankannya sebaik mungkin. Di hadapan bantuan, seorang kades akan tunduk dan patuh menjalankan juklak dan juknis yang diberikan. Agar tetap menerima bantuan, kades lebih memilih menjadi "anak manis" agar wilayahnya masih teraliri bantuan di masa mendatang. Sungguh ironi.

Lantas, apakah bantuan bisa memberdayakan desa? Jawabnya mungkin tetapi tidak ada pihak yang berani memberi garansi. Saya pun teringat lagi dengan sebuah pernyataan staf dinas di kabupaten Kupang yang mengatakan bahwa setiap tahun dirinya selalu membagi benih ke berbagai desa, tetapi katanya "saya sendiri tidak tahu hasilnya seperti apa. Yang penting, anggaran di dinas bisa terserap habis." Artinya, kebijakan yang dilakukan bukan bertujuan untuk melakukan pemberdayaan warga atau mendorong kemajuan pembangunan desa tetapi sekedar menghabiskan anggaran di dinas agar terserap habis dan kinerja dinas yang bersangkutan dinilai baik. Padahal, jika saja dinas tersebut memiliki cetak biru pengembangan kawasan, mungkin ada dua tujuan yang bisa dicapai yakni mendorong kemajuan desa sekaligus menyerap anggaran.

Bercermin pada situasi tersebut, menjadi penting untuk mengubah konsep bantuan menjadi alokasi. Desa diberi alokasi uang yang cukup untuk membiayai apa yang telah direncanakan dan didorong untuk menggunakan uang yang ada sesuai kebutuhan desa. Mendorong kemajuan desa pada hakikatnya memajukan Indonesia. Disadari atau tidak, Indonesia adalah kumpulan dari sekitar 70 ribu desa. Karena itu, jangan sekali-kali mempermainkan desa. 📌

M. Zainal Anwar